

**PERANAN KEPALA DESA TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM PKK
DI KECAMATAN SUMARORONG KABUPATEN POLMAS**



UNIVERSITAS

Oleh

ROSDIANA

4595021034

**Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna
Menempuh Ujian Sarjana Negara
Jurusan Ilmu Administrasi Negara**

P a d a

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS "45" MAKASSAR**

2000

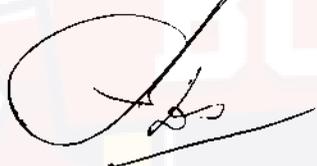
HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Peranan Kepala Desa Terhadap Pelaksanaan
Program PKK di Kecamatan Sumarorong
Kabupaten Polmas

Nama Mahasiswa : ROSDIANA
No. Stb/Nirm : 4595021034/9951110510050
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui :

Pembimbing I



DRS. H. MISBAHUDDIN ACHMAD, MS

Pembimbing II



DRS. M. RIDWAN ISKANDAR, MSi

Mengetahui :

Dekan
Fisipol Universitas "45"

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi
Fisipol Universitas "45"



DRS. HUSAIN HAMKA, MS



DRS. MARTEN D. PALOBO

HALAMAN PENERIMAAN

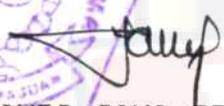
Pada hari Senin tanggal Dua Puluh Dua bulan Mei tahun Dua Ribu, dengan judul skripsi: Peranan Kepala Desa Terhadap Pelaksanaan Program PKK di Kecamatan Sumarorong Kabupaten Polmas.

Nama Mahasiswa : ROSDIANA
No. Stb/Nirm : 4595021034/9951110510050
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

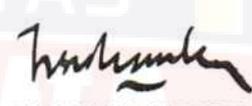
Telah diterima oleh Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Makassar untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ilmu Administrasi Program Studi Ilmu Administrasi Negara.

Pengawas Umum :




DR. ANDI JAYA SOSE, SE, MBA

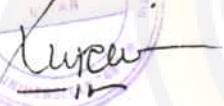
Rektor Universitas "45"


DRS. HUSAIN HAMKA, MS

Dekan Fisipol Univ. "45"

Panitia Ujian




DRA. NURMI NONCI, MS

Ketua


DRS. MARTEN D. PALOBO'

Sekretaris

Tim Penguji

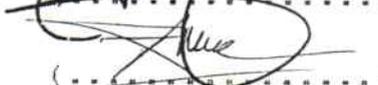
DRS. HUSAIN HAMKA, MS


(.....)

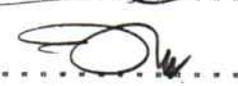
DRS. H. BAHARUDDIN, MSi


(.....)

DRS. M. RIDWAN ISKANDAR, MSi


(.....)

DRA. JUHARNI, MSi


(.....)

KATA PENGANTAR

Fuji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga segala sesuatunya dapat kami selesaikan termasuk dalam penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul "Peranan Kepala Desa Terhadap Pelaksanaan Program PKK di Kecamatan Sumarorong Kabupaten Polmas dimaksud untuk mengetahui bagaimana peranan kepala desa terhadap pelaksanaan program PKK dan bagaimana pula pelaksanaan program PKK itu sendiri di Kecamatan Sumarorong. Di samping itu skripsi ini sekaligus sebagai hasil karya kami dalam menyelesaikan program S1 pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Makassar.

Selama menuntut ilmu dan sampai pada penyelesaian skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara moril maupun material. Kepada mereka semuanya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Dalam kesempatan ini pula, penulis secara khusus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap yang terhormat:

1. Bapak Dr. Andi Jaya Soso, SE, MBA, selaku Rektor Universitas "45" Makassar.
2. Bapak Drs. Husain Hamka, MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Makassar.

3. Bapak Drs. Marten D. Falobo, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Makassar.
4. Bapak Drs. H. Misbahuddin Ahmad, MSi., dan Bapak Drs. Ridwan Iskandar, MSi., sebagai pembimbing pertama dan kedua yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan dan memberi petunjuk kepada penulis dalam rangka penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
5. Rekan-rekan sejawat mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, terlebih kepada rekan-rekan pada jurusan Ilmu Administrasi Negara.
6. Ayah dan ibu serta seluruh keluarga tercinta yang kendati dengan susah payah namun dengan penuh ketulusan hati membiayai dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan penulis serta tidak mengenal lelah dalam membimbing dan memotivasi penulis.
7. Akhirnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan dalam bentuk apapun hingga selesainya skripsi ini. Kepada mereka semua penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya dan semoga Tuhan Yang Maha Esa akan membalas budi dan jasa baiknya, Amin.

Makassar, M e i 2000

Penulis

ABSTRAKSI

Penelitian ini berjudul "Peranan Kepala Desa Terhadap Pelaksanaan Program PKK di Kecamatan Sumarorong Kabupaten Polmas" bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan kepala desa terhadap pelaksanaan program PKK dan bagaimana pula pelaksanaan program PKK di Kecamatan Sumarorong.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan dasar survey yang operasionalnya dalam bentuk terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang aktual sejalan dengan hal-hal yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Sedang tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yakni menggambarkan keseluruhan dari data dan informasi yang terdapat di lapangan.

Data yang ada dalam penelitian ini diperoleh dari kegiatan observasi, wawancara, kuisioner dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan cara mengamati fenomena-fenomena yang sedang berkembang pada objek penelitian. Wawancara dilakukan dengan mengadakan pembicaraan langsung kepada para informan untuk memperoleh data sesuai yang dibutuhkan. Kuisioner dilakukan dengan cara membagi-bagikan angket atau daftar pertanyaan kepada para responden untuk memperoleh jawaban mengenai permasalahan yang diteliti. Adapun dokumentasi dilakukan dengan cara

mencatat berbagai dokumen atau data yang terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan purposive sampling untuk sampel wilayah/daerah dan sampel informan. Adapun penentuan responden dilakukan dengan random sampling atau sampel dipilih berdasarkan acak, yakni memilih secara sembarangan di antara populasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya para kepala desa di Kecamatan Sumarorong sangat berperan terhadap pelaksanaan program PKK. Begitu juga pelaksanaan program PKK di Kecamatan Sumarorong telah berjalan dengan baik dan mendapat tanggapan yang sangat positif dari masyarakat.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAKSI	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Konseptual	9
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Pengertian Peranan, Kepala Desa dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	17
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Desa	23
C. Program-Program Pokok Pembinaan Ke- sejahteraan Keluarga (PKK)	36
BAB III. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	42
A. Keadaan Geografis dan Demografis	42
B. Struktur Organisasi Pemerintahan dan PKK Kecamatan Sumarbrong	52

	Halaman
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN MASALAH .	57
A. Bentuk-Bentuk Peranan Kepala Desa Terhadap Pelaksanaan Program PKK di Kec. Sumarorong	58
B. Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Fungsi Kepala Desa Terhadap Pelaksanaan Program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	66
C. Pelaksanaan Program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga di Kecamatan Sumarorong	75
BAB V. PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran-Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	88

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Distribusi Penduduk Menurut Jenis Kelamin	44
Tabel 3.2 Distribusi Penduduk Menurut Persebarannya	45
Tabel 3.3 Distribusi Penduduk Menurut Golongan Usia	47
Tabel 3.4 Distribusi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	49
Tabel 3.5 Distribusi Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan	51
Tabel 4.1 Kegiatan Penyuluhan Kepala Desa di Kec. Sumarorong	60
Tabel 4.2 Tanggapan Responden Terhadap Kegiatan Penyuluhan Kepala Desa di Kecamatan Sumarorong	61
Tabel 4.3 Kegiatan Motivasi Kepala Desa di Kec. Sumarorong	64
Tabel 4.4 Tanggapan Responden Terhadap Kegiatan Motivasi Kepala Desa di Kec. Sumarorong.	65
Tabel 4.5 Tanggapan Para Kepala Desa Terhadap Faktor Internal Mempengaruhi Fungsinya di Kecamatan Sumarorong	68
Tabel 4.6 Tanggapan Para Kepala Desa Terhadap Faktor Eksternal Mempengaruhi Fungsinya di Kecamatan Sumarorong	70

Halaman

Tabel 4.7	Kegiatan Kelompok Kerja I PKK Kecamatan Sumarorong	76
Tabel 4.8	Tanggapan Responden Terhadap Kegiatan Pokja I PKK Kecamatan Sumarorong	77
Tabel 4.9	Kegiatan Kelompok Kerja II PKK Kecamatan Sumarorong	78
Tabel 4.10	Tanggapan Responden Terhadap Kegiatan Pokja II PKK Kecamatan Sumarorong	79
Tabel 4.11	Kegiatan Kelompok Kerja III PKK Kecamatan Sumarorong	80
Tabel 4.12	Tanggapan Responden Terhadap Kegiatan Pokja III PKK Kecamatan Sumarorong	81
Tabel 4.13	Kegiatan Kelompok Kerja IV PKK Kecamatan Sumarorong	82
Tabel 4.14	Tanggapan Responden Terhadap Kegiatan Pokja IV PKK Kecamatan Sumarorong	83

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa pembangunan yang dilaksanakan dewasa ini bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis serta di dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat dan damai.

Selanjutnya untuk tetap memungkinkan berjalannya pembangunan nasional yang selalu berorientasi kepada tujuan yang ingin dicapai yakni masyarakat adil dan makmur dan agar dapat secara efektif dielakkan hambatan-hambatan dan gangguan-gangguan yang timbul, baik dari dalam maupun dari luar, maka perlu dikembangkan negara sebagai berikut:

- a. Bangsa, dalam hal ini ia berstatus sebagai rumah tangga yang besar yang terdiri dari suatu bangsa dan bahasanya, yang masing-masing tersebar di seluruh nusantara yang mempunyai perasaan senasib, sepenanggungan dan setanah air.

b. Keluarga, dalam keberadaannya sebagai suatu kesatuan masyarakat yang terkecil yang terdiri dari bapak dan ibu sebagai intinya dan pada umumnya disertai dengan anak-anaknya.

Untuk mewujudkan hal di atas tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah beserta seluruhnya aparat saja, melainkan ditentukan oleh seberapa besar pengertian dan kesadaran seluruh lapisan masyarakat untuk terlibat secara langsung dan produktif dalam melaksanakan program-program pemerintah dalam setiap pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam hal ini keberadaan kepala desa sebagai orang nomor satu di dalam struktur kelembagaan di daerah pedesaan diharapkan dapat berperan serta dalam upaya untuk mewujudkan hal di atas.

Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) telah disebutkan bahwa untuk menjamin agar pembangunan nasional dapat berjalan dengan serasi dan seimbang dan agar dapat diwujudkan tujuan nasional yakni suatu masyarakat yang adil dan makmur, dibutuhkan peningkatan kesejahteraan rakyat di segala bidang dan tingkatan. Untuk itu diperlukan keikutsertaan semua pihak tanpa terkecuali baik pria atau pun wanita, tua maupun muda secara lebih aktif di dalam upaya untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut.

Dengan keikutsertaan seluruh komponen yang terdapat dalam masyarakat di dalam berbagai kegiatan-kegiatan pembangunan, akan lebih menambah kekuatan dan kemampuan

bangsa dalam melaksanakan program-program pembangunan, sehingga lebih banyak lagi hasil-hasil yang akan dicapai. Dengan demikian akan lebih menambah dan meningkatkan ketahanan nasional.

Dalam usaha untuk meningkatkan peran keluarga dan anggota masyarakat yang demikian lebih luas dalam upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, berbagai macam program telah dilakukan oleh pihak pemerintah maupun oleh anggota masyarakat pada umumnya. Salah satu program pemerintah yang sekarang ini sedang giat-giatnya dilakukan adalah program pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Program ini pada mulanya lahir dari suatu tinjauan yang sangat kompleks, antara lain adanya suatu pengamatan yang perlunya memberdayakan kaum ibu khususnya dan wanita pada umumnya, mengingat bahwa sejumlah wanita jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah pria. Dan pada sisi lain adanya keinginan untuk lebih meningkatkan kemampuan ibu-ibu rumah tangga sebagai salah satu anggota keluarga inti dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Meskipun demikian, program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) ini perlu bukan hanya bagi kaum atau wanita saja, melainkan semua anggota masyarakat, tua dan muda, pria dan wanita dan sebagainya. Dengan organisasi PKK sebagai salah satu program pemerintah yang bertujuan

untuk mencapai kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat, maka diharapkan adanya perubahan pola hidup masyarakat terutama di daerah pedesaan.

Agar organisasi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga sebagai salah satu wadah yang diharapkan dapat merubah pola hidup masyarakat, dan agar keberadaan lembaga ini benar-benar dirasakan dan dinikmati keberadaannya secara lebih luas, oleh sebab itu diperlukan dukungan dan partisipasi aktif dari semua komponen bangsa tanpa terkecuali, apakah sebagai pemerintah ataupun sebagai masyarakat biasa, sebagai kepala keluarga ataupun sebagai ibu rumah tangga dan lain-lain sebagainya. Dukungan dan partisipasi serta keterlibatannya itu dapat diwujudkan melalui peran sertanya terhadap pelaksanaan program-program PKK itu sendiri yang telah disusun sedemikian rupa.

Program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan potensi-potensi rakyat secara lebih luas, terarah dan terorganisir. Melalui program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) ini pula diharapkan masyarakat lebih aktif dalam mengelolah potensi-potensi yang tersedia. Dengan dibantu oleh pemerintah berupa penyedia sarana dan prasarana atau dukungan-dukungan penunjang lainnya yang kesemuanya mendorong pelaksanaan program PKK secara

maksimal, memudahkan masyarakat dalam melaksanakan program-program PKK, sehingga tujuan dari eksistensi organisasi ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga atau disingkat dengan PKK yang diterapkan pemerintah adalah suatu program yang bersifat menyeluruh dan berlaku umum. Oleh karena itu tidak hanya diperuntukkan bagi satu kelompok atau golongan saja melainkan kepada seluruh bangsa Indonesia tanpa terkecuali baik di daerah perkotaan maupun di seluruh pelosok-pelosok nusantara.

Sebagai bagian dari integrasi bangsa, masyarakat yang berada di Kecamatan Sumarorong pada umumnya, merupakan salah satu sasaran dari pembangunan nasional. Dan salah satu wujud dari pembangunan itu sendiri dalam implementasinya adalah program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga. Oleh karena itu sangat diharapkan pelaksanaannya secara menyeluruh pula.

Dilihat dari eksistensi organisasi PKK di Kecamatan Sumarorong, telah banyak dirasakan manfaatnya. Hal tersebut terlihat dari adanya pola hidup masyarakat, misalnya masyarakat mulai mencintai hidup bersih, keindahan dan sebagainya. Begitu juga kadar keterlibatan ibu-ibu rumah tangga dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi PKK semakin meningkat pula. Kesemuanya itu merupakan suatu langkah positif yang

yang pada akhirnya dapat membawa masyarakat kepada pola hidup yang lebih baik.

Terjadinya perubahan yang demikian, tentu tidak terlepas dari peran serta seluruh komponen yang terdapat dalam masyarakat baik unsur pemerintah, swasta ataupun masyarakat pada umumnya. Dalam hal ini juga keberadaan organisasi PKK itu sendiri.

Meskipun demikian, masih adanya kekurangan dan kelemahan yang dirasakan, misalnya adanya sebahagian masyarakat yang memandang acuh dan lebih bersifat apati terhadap keberadaan PKK. Begitu juga masih terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki, sehingga untuk mengelolah PKK dengan baik masih mengalami hambatan-hambatan.

Berdasarkan pada tinjauan dan konsepsi di atas, penulis berkeinginan untuk meneliti lebih jauh mengenai bagaimana program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dilaksanakan oleh masyarakat dengan memfokuskan penelitian pada salah satu komunitas masyarakat yang berada di Kabupaten Polmas, yakni di Kecamatan Sumarorong yang melibatkan kepala desa sebagai salah satu bagian terpenting dan menentukan dalam upaya untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Organisasi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah suatu organisasi khusus yang dirancang oleh pemerintah untuk memberdayakan keberadaan wanita/ibu-ibu rumah tangga sebagai salah satu potensi bangsa. Dalam keberadaannya, organisasi PKK senantiasa berusaha untuk melaksanakan program-programnya yang telah ditetapkan secara maksimal. Tujuannya adalah untuk menciptakan kesejahteraan umum bagi seluruh lapisan dengan tidak terkecuali baik di kota maupun di pelosok-pelosok desa.

Dalam usaha untuk mewujudkan tujuan PKK, sangat ditentukan oleh berbagai komponen yang berkembang dalam masyarakat. Salah satu di antaranya adalah keberadaan kepala desa itu sendiri yang merupakan orang pertama yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah pedesaan.

Mengingat pentingnya keberadaan kepala desa/lurah dalam upaya untuk mewujudkan program-program PKK, maka dalam kesempatan ini penulis mencoba untuk mengangkat kepala desa/lurah sebagai salah satu komponen yang berperan terhadap pelaksanaan program-program PKK.

Agar terjadi kesamaan persepsi terhadap lingkup permasalahan yang akan diteliti, maka penulis hanya membatasi pada masalah peranan kepala desa terhadap pelaksanaan program-program PKK serta implementasinya

secara lebih jauh oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk lebih jelasnya mengenai permasalahan yang akan dikaji secara empirik tersebut, maka penulis membuat rumusan masalah dengan pertanyaan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk peranan kepala desa terhadap pelaksanaan program PKK di Kecamatan Sumarorong Kabupaten Polmas?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi fungsi kepala desa terhadap pelaksanaan program PKK di Kecamatan Sumarorong Kabupaten Polmas?
3. Bagaimana pelaksanaan program PKK di Kecamatan Sumarorong Kabupaten Polmas?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk peranan kepala desa terhadap pelaksanaan program PKK di Kecamatan Sumarorong Kabupaten Polmas.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi kepala desa terhadap pelaksanaan program PKK di Kecamatan Sumarorong Kabupaten Polmas.
- c. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program PKK di Kecamatan Sumarorong Kabupaten Polmas.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki nilai tambah atau dapat menjadi bahan masukan terhadap berbagai pihak yaitu:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah guna lebih menciptakan suasana yang memungkinkan berkembangnya peranan kepala desa yang lebih besar.
- b. Penelitian ini dapat memberikan dorongan dan motivasi kepada seluruh anggota masyarakat dalam mengembangkan peranannya sebagai salah satu nilai ekonomi dan kemandirian.
- c. Penelitian ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan study pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Makassar.

D. Kerangka Konseptual

Pada setiap status atau kedudukan melekat sejumlah hak dan kewajiban-kewajiban yang diharapkan akan diwujudkan akan diwujudkan menjadi aktivitas atau kegiatan dari yang menduduki status yang bersangkutan. Jika perwujudan itu terjadi barulah timbul apa yang dapat yang disebut dengan peranan. Dengan demikian maka peranan adalah bentuk aktif atau aspek dinamis dari status. Dalam pada itu maka secara operasional yang dimaksudkan dengan peranan pada tulisan ini adalah "kegiatan" yang menduduki

sesuatu status dan yang memainkan peranan pada status itu, bukan saja orang-perorangan tetapi juga badan-badan lain atau lembaga-lembaga lainnya dan sebagainya.

Demikian dapat dikatakan bahwa kepala desa pada statusnya sebagai pimpinan lembaga desa mencakup pula beberapa peranan. Adapun peranan yang melekat pada kepala desa yang akan dikaji di sini adalah peranannya terhadap pelaksanaan program-program PKK itu sendiri yang meliputi kegiatan kepala desa dalam melaksanakan program-program PKK.

Dalam keberadaannya organisasi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) pada dasarnya memiliki sepuluh program utama. Kesepuluh program pokok tersebut meliputi:

- a. Penghayatan dan Pengalaman Pancasila
- b. Gotong-royong
- c. Pangan
- d. Sandang
- e. Perusahaan dan tata laksana rumah tangga
- f. pendidikan dan keterampilan
- g. Pengembangan kehidupan berkoperasi
- h. Kesehatan
- i. Kelestarian lingkungan hidup
- j. Perencanaan sehat." (Djajadiwangsa, 1979).

Dalam upaya untuk melaksanakan program-program PKK tersebut secara maksimal, maka ia sangat ditentukan oleh berbagai faktor. Faktor-faktor itu meliputi: Sikap dan partisipasi masyarakat secara lebih luas terhadap pelaksanaan program-program PKK. Partisipasi yang

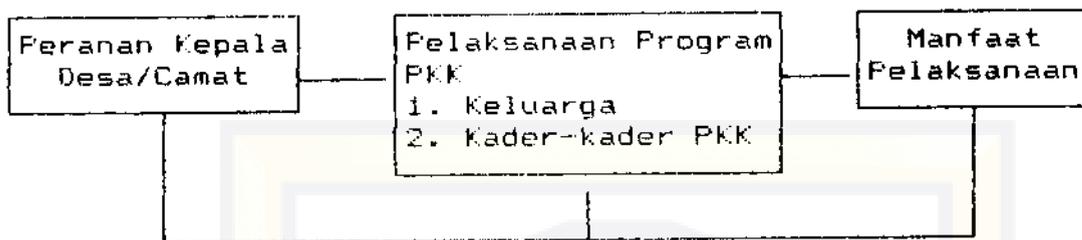
dimaksud disini adalah partisipasi dari masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk melakukan kegiatan-kegiatan atau program-program yang telah ditetapkan oleh organisasi PKK. Dalam hal ini termasuk kerelaan melakukan pengorbanan yang ditentukan oleh pembangunan dari kepentingan bersama yang lebih luas dan lebih penting.

Adapun faktor kedua yang menentukan adalah kemampuan dan peranan kader dalam melakukan fungsi-fungsinya, yang mana mereka inilah yang menjadi motor penggerak organisasi dalam melaksanakan program-program PKK atau sebagai pengelolanya, baik di daerah perkotaan maupun di pedesaan.

Sedangkan faktor ketiga yang ikut menentukan pembangunan baik di desa maupun di kota melalui program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah peranan PKK itu sendiri terutama lurah/kepala desa dan camat sebagai pembina tingkat kelurahan dan desa serta kecamatan yang merupakan ujung tombak dari kegiatan PKK. Peranan camat dan kepala desa dapat memberikan bimbingan, bantuan serta fasilitas kepada organisasi PKK dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Dari uraian di atas, maka secara sederhana dapat dibuat kerangka konseptual dengan gambar sebagai berikut:

**Skema Peranan Kepala Desa Terhadap
Pelaksanaan Program PKK**



E. Metode Penelitian

1. Dasar Penelitian

Dasar penelitian yang digunakan adalah survey yang dilakukan dalam bentuk terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang aktual sebagai bahan dalam menjawab permasalahan.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Hal tersebut dilakukan dengan cara menggambarkan dan menjelaskan fenomena-fenomena yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.

3. Variabel Penelitian

Variabel penelitian ini adalah peranan kepala desa terhadap pelaksanaan program PKK di Kecamatan Sumarorong Kabupaten Polmas.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berada di Kecamatan Sumarorong Kabupaten Polmas.

b. Sampel

Mengingat Kecamatan Sumarorong terdiri atas beberapa desa, maka dalam penelitian ini ditetapkan lima desa yang menjadi sampel. Penentuan sampel di sini dilakukan dengan purposive sampling, yang meliputi:

- Desa Tadisi
- Desa Sasakan
- Desa Sibanawa
- Desa Malimbong
- Desa Messawa

Adapun sampel untuk informan adalah dari aparat pemerintah Kecamatan Sumarorong, Desa, Tim penggerak PKK dan tokoh masyarakat yang berada di Kecamatan Sumarorong. Sedangkan sampel responden sebanyak 50 orang dari anggota masyarakat yang ditentukan dengan memakai sampel acak.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini dapat dibedakan atas:

a. Observasi

Kegiatan observasi merupakan kegiatan yang dilakukan dengan cara mengamati fenomena-fenomena

yang berkembang pada objek penelitian, khususnya yang terkait dengan peranan kepala desa terhadap pelaksanaan program PKK.

b. Wawancara

Teknik wawancara merupakan teknik utama guna memperoleh informasi yang dibutuhkan sebagai bahan di dalam penyusunan skripsi. Wawancara tersebut dilakukan kepada sejumlah informan sesuai yang telah ditetapkan.

c. Kuesioner

Teknik ini dilakukan dengan cara membagi-bagikan angket kepada sejumlah responden guna memperoleh jawaban mengenai permasalahan yang sedang diteliti.

d. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara mencatat berbagai dokumen atau data seperti program-program atau kegiatan-kegiatan PKK dan sebagainya.

6. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam menganalisa data yang diperoleh dilapangan adalah analisa kuantitatif dan analisa kualitatif, dengan cara mendeskripsikan hasil observasi, wawancara, kuesioner dan dokumentasi guna menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi ini tersusun secara sistematis dan terarah serta dengan mudah dapat difahami dan diketahui isi pokoknya maka dapat dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II. Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini diuraikan mengenai pengertian peranan, kepala desa dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), kedudukan, tugas pokok dan fungsi kepala desa serta program-program pokok PKK.

Bab III. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai lokasi penelitian yang mencakup keadaan geografis dan demografis, struktur organisasi pemerintahan dan PKK.

Bab IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam Bab ini akan diuraikan mengenai bagaimana peranan kepala desa terhadap pelaksanaan program-program PKK, faktor-faktor yang mem-

pengaruhi fungsi kepala desa serta bagaimana pelaksanaan program PKK di Kecamatan Sumarorong Kabupaten Polmas.

Bab V. Penutup

Dalam bab ini memuat kesimpulan dari keseluruhan pembahasan beserta sejumlah saran-saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Peranan, Kepala Desa dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

1. Pengertian Peranan

Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah menjalankan suatu peranan. Dengan demikian pengertian peranan dapat dikemukakan sebagai berikut:

"Peranan adalah bagian dari tugas utama yang dilaksanakan. Peranan juga merupakan seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang berkedudukan dalam masyarakat. Peranan adalah bagian yang dimainkan oleh seseorang pemain, misalnya ia berusaha bermain baik disemua peranan yang dibebankan kepadanya." (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998:30).

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulannya dalam masyarakat. Posisi seseorang dalam masyarakat (Social Position) merupakan unsur yang statis dan menunjuk pada tempat individu dalam organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi dan penyesuaian diri serta sebagai suatu proses. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup tiga hal yang meliputi:

- "a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
 - b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
 - c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat."
- (Soekanto, 1990: 269).

Keanekaragaman peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat penting untuk di telusuri lebih jauh dengan bertumpu pada beberapa tinjauan sebagai berikut:

- a. Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.
- b. Peranan tersebut seyogyanya diletakkan pada individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakannya. Mereka harus terlebih dahulu terlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya.
- c. Dalam masyarakat kadang-kadang dijumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat, karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak.

Dari tinjauan di atas, dapatlah difahami bahwa keberadaan peranan yang melekat pada diri setiap individu sangat ditentukan oleh situasi dan kondisi yang berkembang dalam masyarakat. Mungkin disatu sisi peranan yang melekat pada diri seseorang telah menampakkan keberhasilan, tetapi pada sisi dukungan publik terhadap peranan yang dimiliki sangat rendah.

2. Pengertian Kepala Desa

Kepala desa merupakan pemerintahan desa yang diberikan wewenang tersendiri untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 menjelaskan bahwa pemerintah desa adalah kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat yaitu pemerintah desa dan kelurahan." (UU No.5 Tahun 1979: 12).

Dengan melihat penjelasan undang-undang di atas, maka dapat dikatakan bahwa desa adalah bersipat otonom tetapi karena ia merupakan suatu organisasi di bawah camat, maka jelas mempunyai koordinasi dengan pemerintah kecamatan.

Adapun pengertian kepala desa sebagaimana tertuang di dalam buku "Pemerintahan dan Administrasi Desa" karya Drs. Bayu Suryaningrat menyebutkan bahwa:

"Kepala desa adalah penyelenggara pengurusan rumah tangga desa dan penyelenggara pemerintahan desa. Ia wajib melindungi, membela, meningkatkan

kesejahteraannya dan pengetahuan serta kehidupan penduduk desa. Ia mempunyai kedudukan mewakili desa sebagai badan hukum tetapi dalam melaksanakan tugasnya terutama tugas yang penting, ia sedapat mungkin meminta pendapat dan pertimbangan dari anggota pamong praja lainnya."

(Suryaningrat, 1982: 83).

Dari pengertian tersebut jelaslah bahwa kepala desa/lurah tidak lain merupakan penyelenggara pemerintah negara tingkat desa yang diberikan wewenang penuh untuk mengatur rumah tangga sendiri dan sekaligus merupakan komponen utama yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan nasional ditingkat yang lebih rendah.

Mengingat pentingnya peranan kepala desa dalam mewujudkan pembangunan nasional, oleh karena itu diharapkan adanya kemampuan tersendiri, terutama dalam kaitannya dengan upaya untuk mengayomi masyarakat secara keseluruhan agar turut serta dalam segala bentuk pembangunan yang dilaksanakan termasuk keterlibatannya secara lebih aktif dalam kegiatan-kegiatan PKK.

3. Pengertian Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tersusun atas unsur-unsur pembinaan, kesejahteraan dan keluarga itu sendiri. Oleh karena itu, untuk memperoleh pengertian mengenai pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK) dapat dilihat dari unsur-unsur yang terdapat didalamnya yang mencakup:

a. Pembinaan

Menurut Poewadarminta bahwa pengertian pembinaan adalah:

1. Proses, perbuatan, cara membina
2. Pembaharuan, penyempurnaan
3. Usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik." (Poewadarminta, 1988: 177).

b. Kesejahteraan

Secara etimologi kesejahteraan adalah suatu usaha yang akan capai dengan menghilangkan keterbelakangan, kebodohan dan kemiskinan lahir dan bathin. (Ditjen Bangdes, 1976: 2). Sedangkan Hatmanto dalam buku "Pendidikan Kesejahteraan Keluarga" menyebutkan pengertian kesejahteraan sebagai berikut:

"Kesejahteraan dalam suatu keadaan dimana terdapat rasa aman, tenang, makmur lahir dan bathin tetapi berbeda pada setiap individu sesuai dengan nilai-nilai hidup, taraf hidup dan tujuan hidup." (Hatmanto, 1977: 10).

c. Keluarga

Keluarga merupakan suatu sistem jaringan interaksi antara pribadi. Keluarga berperan menciptakan persahabatan, kecintaan, rasa aman dan hubungan antara pribadi. Semuanya itu merupakan dasar bagi perkembangan kepribadian anak. Jadi perkembangan seorang anak itu di dalam keluarga sangat ditentukan oleh situasi dan kondisi orang tuanya.

Pengertian keluarga sebagaimana dikemukakan Murdock di dalam salah satu literturnya menyebutkan bahwa:

"Keluarga merupakan suatu kelompok sosial yang ditandai oleh tempat tinggal bersama, kerja sama ekonomi dan produksi. Ia mencakup orang-orang dewasa dari jenis kelamin, setidaknya-tidaknya sepasang dari mereka, mempunyai hubungan seks yang direstui oleh masyarakat dengan satu anak atau lebih, anak kandung atau anak angkat dari orang-orang dewasa yang hidup bersama secara seksual." (Robinson, 1986: 197).

Dengan demikian dapatlah dinyatakan bahwa Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah gerakan pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah dengan wanita sebagai motor penggeraknya untuk membangun keluarga sebagai unit atau kelompok terkecil dalam masyarakat guna mewujudkan keluarga yang sejahtera, atau dapat pula disebut sebagai setiap usaha yang dilakukan oleh setiap keluarga untuk menciptakan keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara kemajuan lahiriah dan bathiniah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu keluarga yang tenteram kehidupan dan penghidupannya, diliputi oleh rasa saling pengertian, tenggang rasa, kegotongroyongan dalam suasana kekeluargaan yang harmonis, merasa keamanan dan ketertiban terjamin, menjunjung tinggi hak-hak azasi, ketaatan hukum serta melaksanakan kewajiban sebagai warga yang baik dan sosial seperti yang diamanatkan oleh Pancasila.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Desa

Di dalam sistem penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, dijelaskan lebih jauh mengenai kedudukan, tugas pokok dan fungsi kepala desa, sebagai berikut:

- "1. Kepala desa berkedudukan sebagai alat pemerintah desa dan unit pelaksana pemerintahan desa.
 2. Sesuai dengan kedudukan dimaksud, kepala desa mempunyai tugas pokok untuk menyelenggarakan urusan, rumah tangganya sendiri, menjalankan urusan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat dan menumbuhkan serta mengembangkan semangat gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di desa.
 3. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, kepala desa mempunyai fungsi untuk melaksanakan kegiatan di dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangganya, menggerakkan partisipasi masyarakat dalam wilayah desanya, melaksanakan tugas dari pemerintah kecamatan dan pemerintah daerah, melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan lainnya."
- (Sumarno, dkk, 1984: 81).

Dalam peraturan pemerintah (Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 01/1981), tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa dan perangkat desa disebutkan

kepala desa berkedudukan sebagai alat pemerintah, alat pemerintah daerah dan alat pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.

1. Kedudukan Kepala Desa

a. Kepala Desa Berkedudukan Sebagai Alat Pemerintah

Dalam kedudukannya sebagai alat pemerintah pusat seringkali memberikan dua alternatif bagi seorang kepala desa dalam menggerakkan usaha-usaha dalam pelaksanaan pembangunan desa. Pertama, kepala desa hanya merupakan pelaksana dan secara patuh dan bersipat kaku menjalankan perintah-perintah atasan yang berupa program-program pembangunan (pemerintah). Kedua, memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi desa beserta aspirasi penduduk desa. Ia melaksanakan perintah atasan tersebut dengan caranya sendiri yang diharapkan mendapat dukungan rakyat. Artinya ia juga berusaha membawakan aspirasi dari rakyat desanya dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang dilimpahkan kepadanya. Sikap mana antara kedua alternatif tersebut yang dipilih oleh kepala desa, sangat tergantung kepada watak dan kepribadiannya sendiri serta kualitas dirinya.

Sebagai alat pemerintah pusat yang secara struktural melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan pemerintah pusat kepada desa, yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh pemerintah kecamatan dan bupati/walikota, yang meliputi:

- "1. Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dibebankan kepadanya oleh pemerintah atasan.
2. Mengawasi pemerintah desa yang bersangkutan.
3. Mengkoordinir, membantu dan mengawasi institusi-institusi atau petugas-petugas pemerintahan yang berada di desanya.
4. Memelihara ketertiban pemerintahan dan ketertiban sosial di desanya.
5. Melakukan usaha-usaha bagi kemajuan desa di dalam rangka negara bersangkutan." (Ndraha, 1984: 78).

b. Kepala Desa Berkedudukan Sebagai Alat Pemerintah Daerah

Kepala desa dalam kedudukan sebagai alat pemerintah daerah secara khusus tidak ada tugas yang khusus dibebankan. Dalam hal ini kepala desa hanya berkedudukan melaksanakan tugas pembantuan, suatu tugas untuk turut dalam melaksanakan urusan pemerintahan dari perintah tingkat atas dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya.

c. Kepala Desa Berkedudukan Sebagai Alat Pemerintah Desa

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kepala desa adalah administrator pembangunan, administrator pemerintahan dan administrator kemasyarakatan pada lingkup desanya. Disamping itu kepala desa juga sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum, meliputi masalah kesejahteraan, keamanan dan ketertiban umum. Sebagai kepala pemerintahan maka ia tidak berbeda dengan kepala

wilayah kecamatan, bupati/walikota ataupun gubernur. (Supomo dkk, 1984: 26). Kedudukannya sebagai pelaksana tugas-tugas pemerintahan, kepegawaian dan kemasyarakatan lainnya.

2. Tugas-Tugas Kepala Desa

Basis atau dasar daripada manajemen dana kepemimpinan adalah wewenang (authority), (Soekarno, 1980: 58). Demikian halnya seorang administrator, wewenang atau authority adalah "hak seseorang pejabat untuk mengambil tindakan yang diperlukan supaya tugas serta tanggung jawab dapat dilaksanakan dengan berhasil." (Kamus Ensiklopedi: 28). Jadi antara tugas, tanggung jawab dan wewenang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Setiap pejabat yang disertai tugas mempunyai tanggung-jawab agar tugasnya itu dapat dilaksanakan dengan berhasil].

Kepala desa sebagai alat pemerintah di tingkat desa memiliki tugas-tugas sebagai berikut:

- a. Penyelenggara tertinggi pemerintahan desa, memimpin, serta mengasuh desanya.
- b. Mewakili desanya ke dalam dan ke luar.
- c. Melakukan segenap keputusan-keputusan rapat dan segala yang dibebankan kepadanya.
- d. Mengkoordinir atau mengawasi semua lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam desanya seperti RW, RK, koperasi dan LSD, lumbung desa, organisasi pemuda dan sebagainya.
- e. Memimpin atau mengepalai kantor desa.

- f. Mengatur atau memelihara semua objek-objek pekerjaan pemerintahan desa misalnya DAM, saluran air, jalan-jalan raya dan sebagainya.
- g. Membina dan memelihara semua kekayaan desa termasuk diantaranya tanah.
- h. Bila perlu menggerakkan tenaga rakyat di dalam menyelenggarakan proyek-proyek pemerintahan di desanya.
- i. Membina dan mengawasi pengurusan keuangan desa.
- j. Membina dan mengawasi usaha-usaha di bidang kerohanian dan mental penduduk desanya.
- k. Membina dan memelihara usaha-usaha di bidang pendidikan di desanya.
- l. Membina dan memajukan usaha-usaha di bidang keindahan dan hiburan di desanya.
- m. Melakukan usaha-usaha untuk mencegah dan merehabilitasi segenap akibat bermacam-macam bencana alam.
- n. Mengadakan usaha-usaha untuk mencegah dan membasmi segala macam tuna sosial, seperti tuna netra, tuna wisma dan tuna karya, tuna susila dan sebagainya.
- o. Melakukan usaha-usaha di bidang kemakmuran desanya termasuk pembasmian hama, peningkatan kesuburan tanah dan sebagainya.
- p. Melakukan usaha-usaha pemeliharaan kesehatan penduduk desanya.
- q. Melakukan usaha-usaha guna mencegah timbulnya gejala-gejala kriminalitas.
- r. Melakukan daya upaya lain di bidang kemajuan desanya." (Ndraha, 1984: 92).

Memperhatikan tugas-tugas kepala desa sebagaimana telah disebutkan di atas, maka terlihat bahwa tugas

kepala desa sangatlah berat. Ia mempunyai tanggung jawab dan wewenang atas urusan rumah tangganya. Disamping itu pula juga bertanggungjawab atas urusan pemerintahan umum dan sekaligus menjabat sebagai ketua LKMD dan ketua LMD di dalam desanya.

Untuk dapat melaksanakan tugas-tugas yang dimiliki itu, maka diperlukan adanya kemampuan dan tanggungjawab yang lebih besar pada diri setiap kepala desa. Demikianlah Drs. Soekarno. K. menyatakan bahwa:

"Tanggungjawab adalah suatu perasaan yakin/mampu dan sanggup seseorang dalam mencapai sukses dalam tugas-tugas dan pekerjaan-pekerjaan yang dibebankan di atas pundaknya dengan sebaik-sebaiknya."
(Soekarno, 1980: 65).

3. Fungsi Kepala Desa

a. Kepala Desa Berfungsi Sebagai Administrator

Tugas-tugas pembangunan jelas merupakan tanggung jawab setiap warga negara. Tugas-tugas tersebut tidak mungkin dapat diserahkan hanya kepada pemerintah saja, dengan perkataan lain tugas-tugas pembangunan memerlukan suatu kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat umum atau "S.P Siagian" menyebutkan kerja sama nasional. Demikian juga halnya pelaksanaan pembangunan di desa. Keberhasilannya sangat ditentukan oleh adanya kerja sama.

Adapun kerja sama yang dimaksud adalah kerja sama antara berbagai "golongan" (Hasibuan, 1982: 103), di

dalam masyarakat yang harus saling bahu-membahu dalam kegiatan-kegiatan pembangunan, karena kewajiban-kewajiban dari pembangunan itu adalah kewajiban setiap warga negara. Akan tetapi tanggung jawab yang lebih besar harus dipikul oleh kepala desa sebagai "Sentral authority" (Tjokroamidjojo, 1988), dilingkup desa.

Dalam hubungannya dengan fungsi kepala desa sebagai administrator, akan dijelaskan lebih rinci mengenai implementasinya dalam kehidupan sehari-hari yang meliputi:

- Kepala Desa Sebagai Unsur Pembaharu

Sebagai unsur pembaharu, peranan para administrasi dalam birokrasi pemerintahan terendah ini secara khusus adalah kemampuannya untuk mendesain strategi usaha berencana yang mendorong ke arah pembangunan dan pembaharuan dalam berbagai kebijaksanaan atau dalam suatu rencana maupun dalam evaluasi pelaksanaannya. Juga kemampuannya untuk melihat saling kait-mengaitnya berbagai segi yang perlu ditumbuhkan dengan tidak kehilangan prioritasnya. Kemudian agar peranan kepala desa sebagai unsur pembaharu bisa lebih efektif maka yang terakhir yang perlu diperhatikan adalah hubungan-hubungan antara golongan-golongan atau kelompok-kelompok lain dalam masyarakat yang juga mendorong pembaharuan dan pembangunan perlu diupayakan dan diusahakan. (Tjakroamidjojo, 1998: 110).

Dalam kemampuannya mendesain strategi usaha berencana dalam berbagai bentuk kebijaksanaan yang strategis, kepala desa dituntut untuk mampu membuat suatu kebijakan yang lebih operasional, dan mudah diterjemahkan oleh para pelaksana dan masyarakat dalam bentuk tindakan atau perbuatan nyata. Jadi yang penting bagaimana suatu kebijakan atau peraturan bisa efektif dan efisien.

Kemudian kemampuannya untuk melihat saling kait-mengait berbagai segi. Maksudnya kepala desa dituntut kemampuannya untuk mengantisipasi berbagai segi pembangunan. Itu semua penting dan saling menunjang. Tetapi karena berbagai keterbatasan khususnya dana, maka kepala desa harus mampu memilih prioritas yang paling mendesak misalnya apakah pembangunan jalan, atau mungkin irigasi, mesjid dan sebagainya.

▪ Kepala Desa Sebagai Unsur Kepemimpinan Desa

Dalam bukunya "Bintoro" kepemimpinan dirumuskan sebagai: "Kepemimpinan adalah kemampuan yang sanggup meyakinkan orang lain supaya bekerja sama di bawah pimpinannya sebagai suatu team untuk mencapai atau melakukan suatu tujuan." (Tjokroamidjojo, 1988: 110).

Dari uraian di atas dapatlah dimengerti bahwa kepemimpinan sebenarnya tidak lain adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain mau dan rela berpartisipasi padanya untuk mencapai suatu tujuan. Kepemimpinan dalam pembahasan di sini tidak lain adalah

kesanggupannya dan kemampuannya dari para kepala desa untuk berpartisipasi dengannya dalam hubungannya dengan pelaksanaan program PKK.

Agar kepemimpinan para kepala desa memperoleh otoritas, maka dalam kepemimpinannya sedapat mungkin mendapatkan kewibawaan dari masyarakat. Adapun pengertian kewibawaan dapat didefinisikan sebagai berikut:

"Kewibawaan adalah sipat atau ciri dari komunikasi (perintah) di dalam suatu organisasi formal, yang menyebabkan ia diterima oleh anggota organisasi tersebut sebagai suatu yang menguasai dirinya untuk bertindak yaitu suatu yang menguasai atau yang menentukan apa yang harus ia perbuat atau ia tidak boleh lakukan sepanjang mengenai organisasi tersebut." (Tjokroamidjojo, 1988: 42)

Antara kewenangan dan kewibawaan dalam prakteknya sulit untuk dipisahkan, dan oleh karena itu kepemimpinan harus memiliki kedua-duanya yaitu dasar hukum atau legalitas yang memberikan hak padanya untuk memimpin dan kemampuan untuknya diterima kepemimpinannya.

• Kepala Desa Sebagai Unsur Pengambil Keputusan

Banyak ahli berpendapat bahwa fungsi administrator yang paling berat dan sulit adalah fungsi pengambilan keputusan oleh karena sering kali menyangkut kemungkinan adanya suatu kesalahan atau menyangkut kepentingan banyak orang.

Dalam pengambilan keputusan harus dipertimbangkan dari berbagai aspek yang saling berkaitan, kebutuhan mendesak dan kepentingan umum, Kualitas keputusan harus tercermin dari ketiga dimensi tersebut. Kepala desa harus menyadari bahwa sebagai subjek atau pimpinan tertinggi di desa harus berani mengambil keputusan dengan memikul tanggung jawab atas resiko yang timbul sebagai konsekwensi dari keputusan yang diambil.

Di tingkat desa ada dua bentuk keputusan yaitu keputusan desa dan keputusan kepada desa. Keputusan desa adalah "semua keputusan yang telah ditetapkan oleh kepala desa setelah dimusyawarahkan atau dimufakatkan oleh lembaga musyawarah desa serta telah mendapat keputusan/ pengesahan dari bupati atau walikota". Sedang keputusan kepala desa adalah "semua keputusan yang merupakan pelaksanaan dari keputusan desa dan kebijaksanaan kepala desa yang menyangkut pemerintahan dan pembangunan di desa sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum peraturan perundang-undangan yang berlaku." (Peraturan Mendagri, No. 3 Tahun 1981).

Mendati demikian dalam pemerintahan desa, kepala desa yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan terakhir namun tidak berarti bahwa dalam pengambilan keputusan terakhir tidak mengikutsertakan komponen-komponen atau lembaga-lembaga yang terdapat dalam masyarakat.

b. Kepala Desa Berfungsi Sebagai Organisatoris

Sebagai organisatoris atau pelopor organisasi, maka kepala desa dalam usaha memajukan dan meningkatkan masyarakat senantiasa harus pandai mengorganisasikan masyarakat demi untuk mengatasi berbagai hambatan dan kesulitan di dalam meraih sukses.

Perlu diketahui bahwa organisasi dapat disoroti atas dua sudut pandang. Pertama, organisasi sebagai wadah dan kedua organisasi sebagai proses interaksi antar orang-orang yang terdapat didalamnya.

Dalam kedudukannya sebagai suatu wadah, organisasi dapat difahami dari dua sisi yakni sebagai suatu struktur dan kedua sebagai penggunaan dan pemilihan tipe organisasi. Organisasi sebagai struktur di dalamnya terlihat antara lain:

- a. Jenjang hirarki jabatan-jabatan manajerial.
- b. Pelembagaan berbagai jenis kegiatan operasional
- c. Berbagai saluran komunikasi yang terdapat dalam organisasi.
- d. Jaringan informasi yang dapat dijadikan untuk berbagai kepentingan, baik yang sifatnya institusional dan individual.
- e. Hubungan antara satu satuan kerja dengan berbagai satuan kerja lainnya." (Siagian, 1989: 11).

Kedua, organisasi sebagai wadah juga berarti pemilihan dan penggunaan tipe organisasi tertentu. Adapun tipe-tipe organisasi tersebut meliputi:

- "a. Tipe lini
- b. Tipe lini dan staf
- c. Tipe fungsional
- d. Tipe matriks
- e. Tipe panitia". (Siagian, 1989: 12).

Kepala desa sebagai organisatoris hendaknya harus dapat memilih tipe organisasi yang mana dapat diterapkan. Ini tidak lain karena dari sekian banyak tipe organisasi masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Apabila tipe organisasi yang diterapkan tidak sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan, maka organisasi tersebut akan menghambat tujuan dari kegiatan pelaksanaan kegiatan yang direncanakan.

Menurut S.P Siagian bahwa dewasa ini pada umumnya disepakati tipe organisasi lini cocok digunakan apabila:

- "a. Organisasi kecil.
 - b. Jumlah karyawan sedikit dan saling mengenal secara pribadi.
 - c. Tugas yang diemban tidak terlalu berat
 - d. Produk organisasi relatif homogen
 - e. Hubungan atasan-bawahan bersipat personal
 - f. Pengetahuan yang dituntut dari para karyawan belum terlalu spesialis
 - g. Peralatan yang diperlukan relatif sederhana karena yang canggih belum dibutuhkan."
- (Siagian, 1989: 12).

Adapun organisasi sebagai suatu proses bukan hanya antara satu orang dengan orang lain dalam satu satuan kerja, akan tetapi antara satuan kerja yang satu dengan

satuan kerja yang lainnya dalam organisasi. Hal tersebut didasarkan pada suatu kenyataan bahwa dalam kehidupan organisasional, baik pada tingkat individual, tingkat satuan kerja dan tingkat organisasional, tidak ada satu tugas apapun yang dapat terselesaikan hanya oleh seseorang tanpa berinteraksi dengan individu lainnya. Juga tidak akan ada satuan kerja yang dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik apabila tidak berinteraksi dengan satuan kerja lainnya. (Siagian, 1989: 16).

c. Kepala Desa Berfungsi Sebagai Koordinator Pembangunan

Sebagai seorang koordinator tidak lain adalah kemampuannya untuk melaksanakan kerja sama yang baik, baik kepada para anggotanya maupun kepada masyarakatnya. Begitu juga kepada instansi lainnya yang terkait. Kerja sama sesama anggotanya ialah kemampuannya untuk membangkitkan kerja sama yang harmonis di dalam instansi kekuasaannya atau desanya. Ini terutama ditujukan dalam rangka merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang akan dilaksanakan. Demikian juga kerja sama yang ditujukan antar desa/kelurahan yang terutama ditujukan pada masalah-masalah pembangunan yang hampir sama.

Begitu juga kerja sama yang ditujukan kepada para masyarakat atau petani, baik pada tahap perencanaan, maupun pada tahap implementasinya. Hal tersebut sangat penting dilakukan oleh karena masyarakat itu sendiri pada

posisinya dapat dilihat dari dua sisi, pertama masyarakat sebagai objek pembangunan dan kedua masyarakat sebagai subjek pembangunan. Sebagai objek pembangunan maka masyarakat merupakan sasaran utama dalam pelaksanaan pembangunan dalam hal ini termasuk pelaksanaan program PKK. Sedang sebagai subjek tentu tidak terlepas dari keterlibatannya dalam proses pelaksanaan program-program pembangunan itu sendiri.

C. Program-Program Pokok Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Dalam keberadaannya sebagai suatu lembaga yang bersipat non formal telah mencakup beberapa program pokok. Adapun dari program-program pokok yang terdapat pada organisasi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) itu mencakup:

- a. Penghayatan dan pengalaman Pancasila
- b. Gotong-royong
- c. Pangan
- d. Sandan
- e. Perumahan dan tata laksana rumah tangga
- f. Pendidikan dan keterampilan
- g. Pengembangan kehidupan berkoperasi
- h. Kesehatan
- i. Kelestarian lingkungan hidup
- j. Perencanaan sehat." (Djajadiwangsa, 1979: 21)

Kesepuluh program pokok tersebut berkaitan antara satu dengan lainnya dan menyangkut kebutuhan masyarakat.

Untuk itu diperlukan kesadaran bagaimana melaksanakan kesepuluh program PKK tersebut sehingga dapat diwujudkan masyarakat yang sejahtera. Oleh karena itu memerlukan penjelasan lebih jauh sebagai berikut:

a. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila

Pancasila adalah falsafah hidup, dasar negara, kepribadian dan jiwa bangsa Indonesia, serta tujuan hidup. Oleh sebab itu penghayatan dan pengamalan Pancasila harus diwujudkan oleh seluruh masyarakat melalui tingkah laku dan perbuatannya sehari-hari. Hal ini berarti pula setiap keluarga harus memiliki kesadaran, ketaatan serta keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan tetap menyadari pentingnya perwujudan kerukunan dalam kehidupan umat beragama, penyebaran nilai-nilai luhur Pancasila itu ditempuh melalui penataran-penataran yang diselenggarakan oleh team PKK baik di desa ataupun di kota.

b. Gotong-royong

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup tanpa manusia yang lain. Mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan baik lahir maupun bathin. Oleh karena itu terdapat saling bergantung di antara mereka makhluk Tuhan.

Gotong-royong merupakan suatu bentuk kerja sama yang secara spontan dan melembaga di kalangan masyarakat dan warga di desa khususnya, maka dengan membina dan melaksanakan gotong royong, potensi desa dapat dikembang-

kan dan digerakkan untuk tujuan yang produktif menyangkut kepentingan bersama masyarakat.

c. Pangan

Pengetahuan mengenai makanan (pangan) yang bergizi sangat perlu artinya bagi setiap anggota keluarga, karena makanan yang bergizi diperlukan demi kelangsungan hidup anggota keluarga dan untuk membentuk keluarga sehat dan sejahtera.

Fungsi-fungsi gizi makanan bagi manusia adalah sebagai berikut:

- "a. Untuk menimbulkan pembakaran dalam tubuh. Dengan adanya pembakaran, timbullah tenaga yang menyebabkan tubuh kita menjadi kuat, kita dapat bekerja dan dapat berpikir.
- b. Untuk pertumbuhan dan perkembangan
- c. Untuk mengqantikan sel-sel yang rusak.
- d. Untuk mengatur atau melindungi bekerjanya alat-alat, di dalam tubuh." (Mustafa, 1987: 231).

d. Sandang

Sandang sebagai salah satu kebutuhan pokok, perlu mendapat perhatian keluarga yaitu yang memenuhi kesehatan dan kemampuan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah pakaian. Pakaian adalah suatu kebutuhan primer yang berguna melindungi badan dari pengaruh luar seperti panas, hujan dan sebagainya.

e. Perumahan dan tata laksana rumah tangga

Rumah sebagai tempat berteduh atau berlindung dan membina keluarga, merupakan kebutuhan pokok disamping

sandang dan pangan. Rumah tempat tinggal sehari-hari harus memenuhi dari syarat-syarat. Adapun rumah sehingga dikatakan sehat apabila memenuhi dari syarat-syarat sebagai berikut:

- "- Ada sumber airnya yang dipakai memasak, mencuci dan juga untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain.
- Air kotor dapat mengalir keselokan. Dengan demikian tidak mungkin adanya genangan air.
- Ada tempat pembuangan sampah
- Ada kamar mandi dan WC
- Bangunan rumah itu sendiri tidak memungkinkan untuk bersembunyi binatang jahat seperti tikus dan lainnya.
- Cukup ada jalan udara keluar dan masuk rumah
- Sinar matahari pagi dengan leluasa masuk ke rumah, terutama ke kamar tidur.
- Sinar matahari sore tidak langsung ke ruang-ruang rumah.
- Bangunan dan konstruksi rumah hendaknya kuat, meski dibuat dengan bahan-bahan yang sederhana." (Suparni, 1980: 15).

Pembinaan tata laksana rumah tangga dilaksanakan, karena rumah tidak hanya dilengkapi dengan sejumlah ruangan tetapi juga dilengkapi dengan perabot-perabot rumah. Baik ruangan maupun perabot-perabot itu harus diatur dan dirawat sebaik-baiknya sehingga fungsi dari ruangan dan perabot itu dapat tercapai. Pengaturan ini mempunyai seni dan pengaturan tersendiri yang disebut dengan tata laksana rumah tangga.

Pengaturan dan penataan yang tepat dan serasi bagi setiap orang, khususnya penghuni rumah itu sendiri. Tujuannya adalah bagaimana caranya agar pembagian tugas di dalam rumah tangga dapat terlaksanakan dengan sebaik-baiknya.

f. Pendidikan dan keterampilan

Secara sederhana pendidikan berarti membimbing seseorang; kearah kedewasaan agar menjadi manusia yang terdidik sehat jasmani dan rohani, guna mencapai kesejahteraan lahir dan bathin. Pendidikan erat kaitannya dengan pembentukan diri pribadi dan watak seseorang. Pendidikan keterampilan juga sangat berguna bagi pengembangan kreativitas masyarakat. Hal ini tentu perlu dibina melalui latihan dan sebagainya.

g. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu faktor utama dalam kehidupan kita. Kesehatan bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit tetapi perlu diketahui bahwa perasaan bahagia, nyaman hanya dapat dirasakan oleh seseorang yang sehat jasmani dan rohaninya. Pada badan yang sehat memancarkan pula jiwa yang sehat. Olehnya itu setiap keluarga harus benar-benar mengetahui tentang pentingnya kesehatan.

Dengan demikian, bimbingan dan penyuluhan secara terus menerus terhadap masyarakat sangat diharapkan agar pemeliharaan kesehatan pribadi dan keluarga dapat ter-

jamin. Usaha pemeliharaan kesehatan itu antara lain melalui:

- Usaha perbaikan gizi keluarga
- Pembentukan posyandu dan sebagainya.

h. Mengembangkan kehidupan berkoperasi

Koperasi merupakan bentuk dari usaha bersama yang berazaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan. Kesadaran terhadap manfaat koperasi perlu dikembangkan dan dibina dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

i. Kelestarian lingkungan hidup

Hal ini perlu mendapat perhatian agar selalu tercipta suatu keserasian dan ketenteraman kehidupan keluarga bertetangga dan bermasyarakat. Dalam hal ini perlu diperhatikan lingkungan perumahan yang bersih dan sehat, penghijauan tanah pekarangan dengan berbagai tanaman yang berguna untuk keperluan keluarga.

j. Perencanaan sehat

Perencanaan sehat merupakan suatu cara mengatur dan membuat rencana hidup keluarga dengan pertimbangan bakat, kemampuan masing-masing anggota keluarga. Memberikan kesadaran akan pentingnya perencanaan kehidupan yang berguna untuk mencapai kesejahteraan keluarga. Perencanaan sehat ini meliputi tata laksana rumah tangga itu sendiri yang serasi, pemakaian waktu tenaga dan penghasilan dengan sebaik-baiknya.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Geografis dan Demografis

1. Keadaan Geografis

Kecamatan Sumarorong merupakan salah satu kecamatan yang berada di dalam wilayah Kabupaten Polewali Mamasa (Polmas), dengan luas wilayah keseluruhan 29013,6 Ha.

Ditinjau dari kondisi geografisnya, Kecamatan Sumarorong merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Polmas yang memiliki potensi di bidang pertanian. Hal tersebut terlihat dari luas areal yang dimiliki (pertanian) 19352,1 Ha atau 66,7% dari luas wilayah yang dimiliki. Dengan keadaan geografis seperti itu, memungkinkan Kecamatan Sumarorong merupakan salah satu penyangga utama dalam menunjang pembangunan nasional menuju kehidupan bangsa yang semakin sejahtera dengan ketersediaan bahan sandang, pangan dan papan yang lebih memadai.

Dalam upaya untuk mewujudkan negara yang sejahtera dengan dukungan hasil pertanian yang maksimal diperlukan adanya kemampuan, keuletan dan kesungguhan masyarakat di dalam mengelola areal pertanian yang tersedia. Dalam hal ini pengetahuan-pengetahuan masyarakat yang terkait erat dengan itu mutlak adanya. Demikian juga sarana dan prasarana penunjang lainnya yang mendukung terhadap pencapaian hasil pertanian yang semaksimal mungkin.

Agar terdapat gambaran yang jelas mengenai letak dan posisi daerah ini, di bawah ini dikemukakan beberapa daerah yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Sumarorong yang meliputi:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Mamuju.
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tator.
- Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Wonomulyo.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Folewali.

2. Keadaan Geografis

Perlu diketahui bahwa penduduk yang menunjang pembangunan adalah penduduk yang berkualitas tinggi yakni penduduk yang didukung oleh kemampuan ekonomi yang mapan dan tingkat pendidikan yang tinggi serta oleh kondisi sosial politik yang cukup stabil dan memadai.

Faktor penduduk adalah merupakan salah satu unsur penunjang dan terpenting bagi suatu daerah karena penduduk merupakan salah satu sumber daya yang sangat potensial bagi pembangunan bangsa seutuhnya. Dengan demikian setiap usaha yang berhubungan erat dengan kependudukan harus bertujuan untuk memfungsikan potensi manusia secara utuh dan optimal sekaligus sebagai bagian yang tak terpisahkan dari usaha-usaha peningkatan taraf hidup masyarakat. Penduduk yang dapat menunjang pembangunan adalah penduduk yang berkualitas tinggi yang mencakup semua aspek baik pendidikan, ekonomi dan sosial politik masyarakat.

Kecamatan Sumarorong yang di dalamnya terdapat sejumlah penduduk turut serta mengambil bagian baik dalam kaitannya sebagai subjek atau pelaku pembangunan maupun sebagai objek atau sasaran dari pembangunan itu sendiri, di dalamnya terdapat kondisi masyarakat yang sangat pluralistik baik di bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya masyarakat. Olehnya itu untuk mengetahui sejauh mana kemajemukan itu di bawah ini akan diuraikan secara lebih rinci sebagai berikut:

a. Distribusi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Tabel 3.1

Distribusi Penduduk
Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Laki-laki	5187	48,14
2.	Perempuan	5587	51,86
Jumlah		10774	100

Sumber : Kantor Kecamatan Sumarorong, 2000

Dari tabel tersebut terlihat bahwa penduduk yang berada di Kecamatan Sumarorong menurut data tahun 2000 berjumlah 10774 orang yang terdiri atas 5187 atau 48,14% dan 5587 atau 51,86% perempuan. Dalam hal ini dapat dipahami pula bahwa di dalam kelahiran seratus anak pada setiap waktu maka kurang lebih 40% diantaranya adalah anak yang memiliki jenis kelamin laki-laki sedang 50%

anak yang memiliki jenis kelamin perempuan. Atau mungkin dalam suatu kelahiran didominasi oleh suatu jenis kelamin tetapi pada kelahiran berikutnya justru didominasi oleh jenis kelamin lainnya dalam jumlah kurang lebih sama.

b. Distribusi Penduduk Menurut Persebarannya

Tabel 3.2
Distribusi Penduduk
Menurut Persebarannya

No.	Nama Desa/Kel.	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Tadisi	1361	12,63
2.	Tabone	828	7,69
3.	Messawa	839	7,79
4.	Sepang	1100	10,21
5.	Matangga	1276	11,84
6.	Sasakan	812	7,54
7.	Batanggeru	807	7,49
8.	Rippuang	638	5,92
9.	Makuang	630	5,85
10.	Sibanawa	463	4,30
11.	Tapua	928	8,61
12.	Malimbong	1092	10,14
Jumlah		10774	100

Sumber : Kantor Kecamatan Sumarorong, 2000

Pada tabel 3.2 yang menggambarkan distribusi penduduk dalam persebarannya menunjukkan bahwa tingkat

persebaran penduduk di Kecamatan Sumarorong relatif berimbang, meski ada beberapa desa/kel. diantaranya yang memiliki kepadatan penduduk yang lebih besar dibandingkan dengan desa/kel. lainnya dalam wilayah Kecamatan Sumarorong.

Terjadinya keadaan persebaran penduduk yang demikian, disebabkan oleh berbagai faktor antara lain adanya kesadaran masyarakat akan perlunya perbaikan ekonomi sehingga untuk mencapai keadaan ekonomi yang lebih baik maka faktor lahan merupakan aspek yang sangat menentukan. Oleh karena itu masyarakat melihat bahwa mencari lahan yang kosong merupakan salah satu solusi dalam menanggulangi terjadinya ruang ekonomi.

Dengan adanya pandangan masyarakat yang demikian, menyebabkan sebagian masyarakat yang ada di Kecamatan Sumarorong mencari di mana lokasi yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang lebih rendah untuk mencari kehidupan baru dalam rangka menuju kehidupan perekonomian yang lebih baik.

Faktor lainnya yang menyebabkan sehingga tingkat persebaran penduduk di daerah ini relatif lebih seimbang adalah persoalan kultur. Mereka beranggapan bahwa tanah kelahiran adalah merupakan bagian dari kehidupannya. Oleh karena itu sebagian besar masyarakat di daerah ini merasa enggan untuk migrasi. Dengan demikian tidak memungkinkan terjadinya penumpukkan penduduk pada salah satu desa/kelurahan.

c. Distribusi Penduduk Menurut Golongan Usia

Tabel 3.3

Distribusi Penduduk
Menurut Golongan Usia

No.	Golongan Usia (Tahun)	Frekuensi (Jiwa)	Persentase (%)
1.	0 - 3	520	4,83
2.	4 - 6	724	6,72
3.	7 - 9	875	8,12
4.	10 - 12	924	8,58
5.	13 - 15	1005	9,33
6.	16 - 21	1015	9,42
7.	22 - 27	1120	10,40
8.	28 - 33	1100	10,21
9.	34 - 39	905	8,40
10.	40 - 45	750	6,96
11.	46 - 51	650	6,03
12.	52 - 57	500	4,64
13.	58 - 63	366	3,40
14.	64 ke atas	320	2,97
Jumlah		10774	100

Sumber : Kantor Kecamatan Sumarorong, 2000

Pada tabel 3.3 yang menjelaskan tentang distribusi penduduk menurut golongan usia, menunjukkan bahwa penduduk yang tertinggi berada pada usia 22 hingga 27

tahun yang mencapai 1120 orang atau 10,40% dari jumlah penduduk keseluruhan.

Dilihat dari pertumbuhan penduduk maka masyarakat yang berada di Kecamatan Sumarorong dapat dikategorikan sebagai masyarakat muda. Hal tersebut tergambar dari perkembangan jumlah penduduk dalam setiap tahunnya, dimana memperlihatkan adanya kecenderungan membentuk model batu nisan yakni jumlah penduduk usia muda masih lebih tinggi dibanding dengan usia tua.

Latar belakang terjadinya golongan usia demikian itu dimana usia muda masih relatif lebih tinggi dari usia tua atau usia non produktif masih lebih tinggi dari usia produktif, di satu sisi masih berkembangnya pemikiran di kalangan masyarakat yang menganggap bahwa makin banyak anak maka semakin banyak pula rezeki tanpa harus melihat terhadap dukungan ekonomi yang mereka miliki. Pada sisi lain masyarakat belum menganggap program Keluarga Berencana (KB) sebagai salah satu upaya pemerintah dalam usaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat terutama bagi kalangan ekonomi lemah sebagai salah satu solusi dalam menghindari beban ekonomi keluarga yang terlalu tinggi. Dengan kata lain bahwa program keluarga berencana yang selama ini terus diupayakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah belum memperlihatkan hasil-hasil yang maksimal.

d. Distribusi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tabel 3.4

Distribusi Penduduk
Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Frekuensi (Jiwa)	Persentase (%)
1.	Tidak tamat SD	3964	36,73
2.	Tamat SD	3777	35,06
3.	Tamat SMP	1922	17,84
4.	Tamat SMA	996	9,25
5.	Akademi	73	0,68
6.	Perg. Tinggi	42	0,39

Sumber : Kantor Kecamatan Sumarorong, 2000

Tingkat pendidikan dapat menjadi salah satu variabel dalam melihat perekonomian rakyat. Masyarakat yang tingkat pendidikannya lebih tinggi pada umumnya lebih banyak memperlihatkan kehidupan ekonomi yang lebih baik. Sebaliknya masyarakat yang tingkat pendidikannya lebih rendah umumnya juga memperlihatkan kondisi perekonomian mereka lebih rendah pula. Dengan demikian pendidikan merupakan salah satu dasar di dalam menentukan perekonomian seseorang.

Dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat, maka dapatlah dikatakan bahwa tingkat pendidikan masyarakat di kecamatan Sumarorong relatif masih minim. Minimnya

tingkat pendidikan tersebut tercermin dari jumlah penduduk yang memiliki tingkat pendidikan tinggi (SMA keatas) yang hanya berjumlah 1111 atau 10,31% dari jumlah penduduk keseluruhan. Sedang mereka yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah (SMP ke bawah) berjumlah 5699 orang atau 52,90% dan yang tidak tamat SD berjumlah 3964 atau 36,73%.

Pada tabel terdahulu (Tabel penggolongan usia) dapat diperoleh informasi bahwa jumlah penduduk yang tidak tamat Sekolah Dasar (SD) tetapi karena memang belum termasuk usia sekolah berkisar 1244 atau 11,55%. Sedang yang sementara duduk dibangku sekolah dasar berkisar 1799 atau 16,70%. Adapun yang memang tidak tamat SD dan sudah tergolong usia dewasa berkisar 930 atau 8,63%.

Dengan data yang diperoleh seperti itu, jelaslah bahwa pada umumnya tingkat pendidikan masyarakat yang berada di Kecamatan Sumarorong relatif masih rendah. Rendahnya dari pada tingkat pendidikan di daerah ini sangatlah terkait dengan banyak faktor, antara lain faktor ekonomi, kondisi sosial serta faktor-faktor lainnya yang dapat menghambat jalannya proses pendidikan itu sendiri.

e. Distribusi Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan

Tabel 3.5

Distribusi Penduduk
Menurut Jenis Pekerjaan

No.	Jenis Pekerjaan	Frekuensi (Jiwa)	Persentase (%)
1.	Peg. Negeri Sipil	588	13,53
2.	TNI/Polri	291	6,70
3.	Pengusaha/Pedagang	49	1,13
4.	Petani	3418	78,65

Sumber : Kantor Kecamatan Sumarorong, 2000

Dari tabel di atas terlihat bahwa masyarakat terbagi ke dalam beberapa jenis pekerjaan dan jenis pekerjaan yang paling banyak digeluti masyarakat di daerah ini adalah sebagai petani yang mencapai 3418 atau 78,65% dari keseluruhan penduduk di kecamatan Sumarorong yang telah mempunyai pekerjaan tetap. Adapun jenis pekerjaan yang paling sedikit digeluti masyarakat adalah sebagai pedagang/pengusaha yang hanya mencapai 49 orang atau 1,13%.

Dengan angka 3418 atau 78,65 penduduk berpropesi sebagai petani dapat dinyatakan bahwa hampir keseluruhan penduduk di daerah ini adalah sebagai petani. Banyaknya penduduk di daerah ini yang pekerjaannya sebagai petani sangat terkait dengan rendahnya kemampuan yang dimiliki

untuk memilih pekerjaan yang berkualitas tinggi dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi pula. Disamping itu juga tidak terlepas dari status daerah ini sebagai pedesaan yang tentunya merupakan basis utama bagi setiap anggota masyarakat untuk memperoleh sumber kehidupan.

Adapun masyarakat yang mempunyai pekerjaan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil, Polri/TNI, pengusaha dan pedagang pada umumnya memperlihatkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi pula. Konsekwensi ekonomisnya menunjukkan bahwa masyarakat yang mempunyai pekerjaan yang berkualitas tinggi dengan yang lebih membutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang lebih luas pula, jauh lebih besar nilai ekonominya/penghasilan yang diperoleh masyarakat dibandingkan dengan masyarakat yang kesehariannya sebagai penggarap sawah atau ladang.

B. Struktur Organisasi Pemerintahan dan PKK Kecamatan Sumarorong

Untuk dapat melaksanakan tugas organisasi dengan baik, organisasi pemerintah dan organisasi non pemerintah diperlukan adanya pembagian tugas yang jelas, karena suatu pekerjaan dilakukan oleh banyak orang yang dianggap mampu untuk melaksanakannya. Selain itu perlu pula penempatan personil yang tepat, sehingga lebih menjamin tercapainya tujuan yang lebih ditetapkan. Disamping itu prinsip pembagian tugas yang jelas dalam organisasi memungkinkan pencapaian tujuan lebih efisien dan efektif.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu adanya struktur organisasi yang membagi-bagi tugas, kedudukan dan fungsi secara jelas dan tegas bagi setiap aparat dalam suatu bidang kerja tertentu, karena dengan adanya pembagian tugas, kedudukan dan fungsi yang jelas adalah merupakan prinsip organisasi dalam upaya untuk meringankan beban, baik pimpinan ataupun bawahan dalam berbagai kegiatan sehingga dapat tercapai tujuan organisasi dengan sebaik-baiknya.

Menurut John M. Pfiffner dan S. Owen Lane mengatakan bahwa organisasi adalah:

"Organisasi adalah proses penggabungan pekerjaan orang-orang atau kelompok harus dilakukan dengan kekuasaan yang diperlukan untuk melaksanakannya, sehingga kewajiban-kewajiban yang dilaksanakannya demikian itu, memberikan saluran terbaik bagi penyelenggaraan usaha yang efisien, teratur, positif, teratur, positif dan terkoordinasi." (Sutarso, 1994: 190).

Dari pengertian yang telah disebutkan dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dasar organisasi itu meliputi:

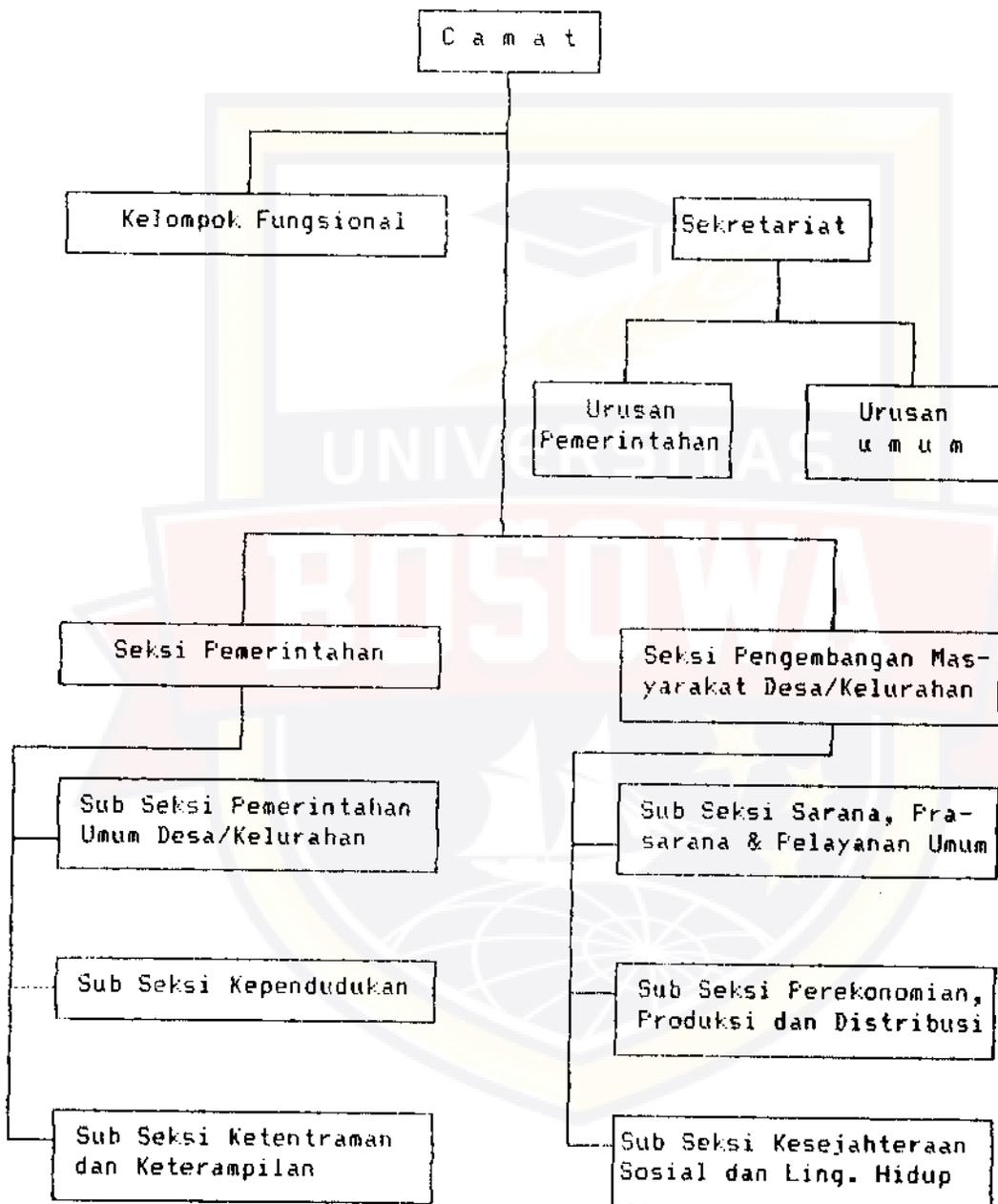
- Mempunyai tujuan yang jelas
- Terdiri atas dua orang atau lebih yang membentuk kelompok.
- Adanya hubungan kerja dalam pelaksanaan tugas.
- Adanya kerja sama atau dengan lainnya.

Dari empat unsur-unsur organisasi itu merupakan rangkaian yang tidak dipisah-pisahkan satu dengan lainnya dalam suatu organisasi. Oleh karena itu dalam organisasi pemerintahan dan PKK kecamatan Sumarorong yang terdiri atas banyak unsur-unsur secara bersama-sama melakukan tugas-tugasnya yang telah ditetapkan dan mempunyai tujuan yang ingin dicapai guna kepentingan organisasi.

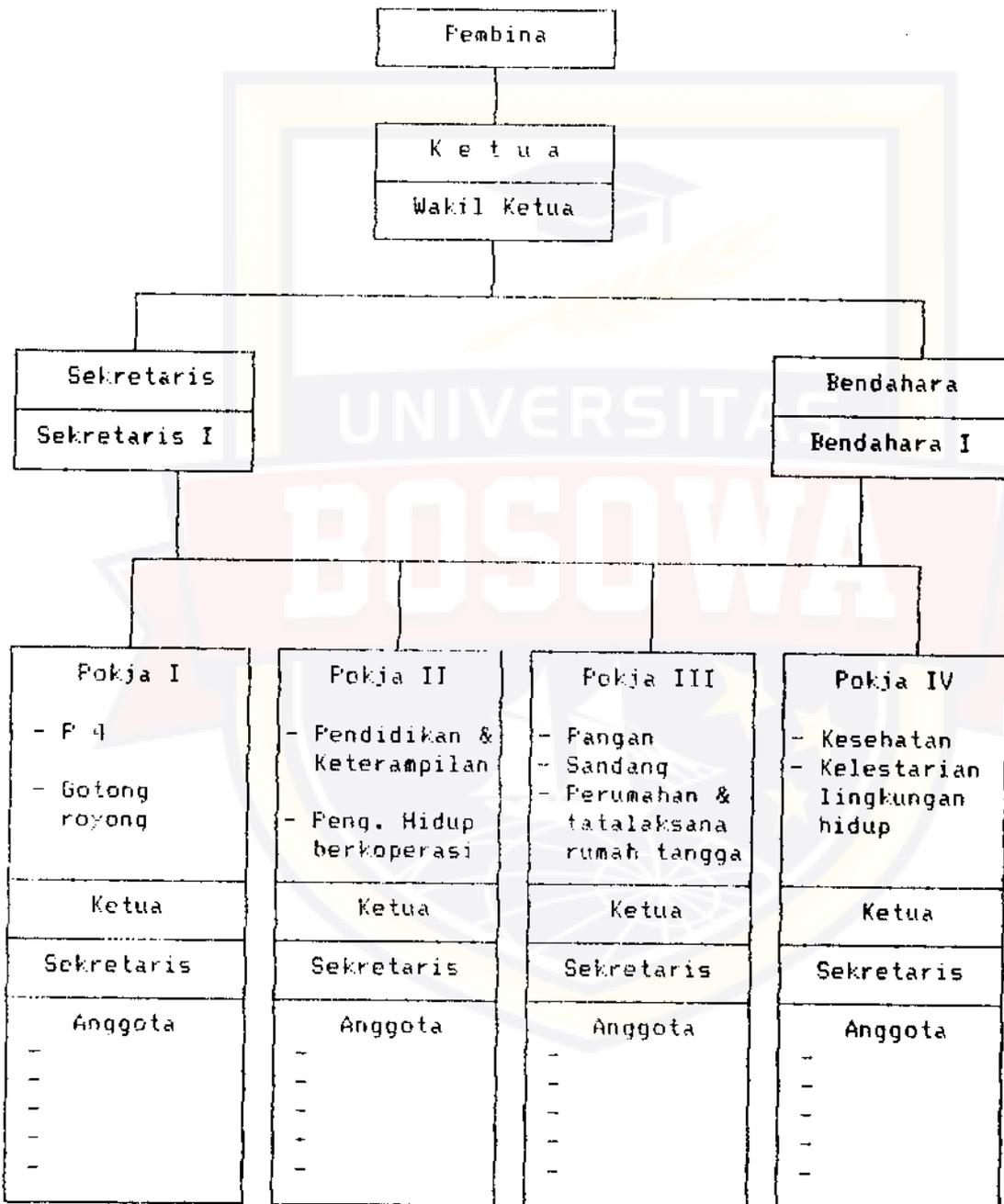
Telah diketahui bahwa semakin besar dan meluasnya tujuan organisasi maka semakin besar yang harus bekerja sama dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang telah ditetapkan serta kebutuhan pula adanya pembagian tugas secara terstruktur untuk menetapkan tugas masing-masing sehingga tidak terjadi tugas rangkap.

Organisasi pemerintahan dan PKK kecamatan Sumarorong juga mempunyai struktur sebagaimana layaknya suatu organisasi, dan akan lebih nampak dengan jelas apabila dituangkan dalam bagan organisasi. Yang dimaksud dengan struktur organisasi di sini adalah kerangka antar hubungan satuan-satuan organisasi yang didalamnya terdapat pejabat-pejabat, tugas dan wewenang yang mempunyai peranan tertentu dalam kesatuan yang utuh.

Struktur Organisasi Pemerintahan
Kecamatan Sumarorong



Struktur Organisasi PKK
Kecamatan Sumarorong



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN MASALAH

Dalam pembahasan terdahulu telah dikemukakan bahwa peranan merupakan aspek dinamis dari status atau kedudukan. Dengan pengertian demikian dapatlah diketengahkan bahwa kepala desa sebagai komponen utama dalam organisasi pemerintahan tingkat desa telah memiliki peranan-peranan tertentu yang implementasinya dapat dimanipulasikan dalam berbagai sikap perilaku dan keputusan-keputusan lainnya.

Oleh karena kepala desa merupakan unsur aparat pemerintah yang diperbantukan oleh negara tingkat desa dengan demikian segala peraturan, keputusan dan sikap yang dihasilkan oleh kepala desa yang berhubungan dengan masalah-masalah kehidupan masyarakat desa merupakan suatu keputusan pemerintah. Keputusan kepala desa yang demikian itu merupakan suatu peranan yang mana peranan tersebut tidak lain merupakan suatu tugas yang akan dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian peranan kepala desa merupakan seperangkat kegiatan yang dilakukan oleh setiap kepala desa dalam rangka terselenggaranya pembangunan bangsa menuju kehidupan masyarakat yang lebih baik, aman, tentram, tertib dan dinamis serta dilandasi oleh adanya kepercayaan akan kemampuan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang demikian kepala desa diisyaratkan senantiasa mengambil keputusan-keputusan yang bermanfaat bagi masyarakat. Keputusan-keputusan itu tidak hanya dalam satu lingkup permasalahan saja melainkan dilakukan dalam semua dimensi masyarakat, sehingga potensi-potensi yang tersedia memungkinkan untuk dinikmati hasilnya oleh masyarakat. Salah satu di antara potensi itu adalah perlunya pemberdayaan kaum ibu sebagai salah satu aset bangsa yang diharapkan dapat berperan serta dalam usaha untuk memajukan kehidupan bangsa yang lebih baik.

Agar pemberdayaan ibu-ibu rumah tangga itu lebih terorganisir dan lebih terarah maka dibentuklah suatu badan yang diharapkan dapat mewadahi keberadaan para ibu dalam melakukan fungsinya. Badan itu tidak lain adalah organisasi PKK itu sendiri.

Untuk melihat sejauh mana peranan para kepala desa di kecamatan Sumarorong dalam rangka pelaksanaan program PKK di wilayah ini, berikut ini akan diketegahkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebagai berikut:

A. Bentuk-Bentuk Peranan Kepala Desa Terhadap Pelaksanaan Program PKK di Kecamatan Sumarorong

Terhadap permasalahan ini penulis melihat bahwa telah terdapat keanekaragaman peranan yang dilakukan oleh masing-masing kepala desa dalam rangka terselenggaranya

program PKK secara lebih baik. Namun secara garis besarnya dapat disimpulkan bahwa secara umum terdapat dua bentuk peranan kepala desa yang paling nampak. Kedua bentuk peranan itu meliputi pemberian penyuluhan dan pemberian motivasi.

1. Pemberian Penyuluhan

Penyuluhan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam pelaksanaan program PKK, sebab dengan penyuluhan diharapkan pengetahuan masyarakat akan bertambah. Dengan bertambahnya pengetahuan masyarakat tersebut, maka secara tidak langsung pelaksanaan program PKK ini berhasil. Sebaliknya dengan pengetahuan yang dimiliki masyarakat yang masih rendah maka secara tidak langsung pula menghambat tercapainya pelaksanaan program PKK.

Jadi salah satu jalan yang ditempuh oleh para kepala desa di Kecamatan Sumarorong ialah dengan jalan mengadakan penyuluhan-penyuluhan. Mengenai penyuluhan tersebut beserta bentuk-bentuknya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.1

Kegiatan Penyuluhan Kepala Desa
di Kecamatan Sumarorong

No.	Jenis Kegiatan	Frekuensi
1.	Penyuluhan Kesehatan	6 kali
2.	Penyuluhan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	4 kali
3.	Penyuluhan KB	8 kali
4.	Penyuluhan Usaha Kecil dan Mandiri	2 kali

Sumber: Hasil Penelitian di Kecamatan Sumarorong, 2000

Dari tabel di atas diketahui bahwa terdapat empat bentuk kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh kepala desa di daerah ini. Keempat bentuk penyuluhan tersebut meliputi: Penyuluhan kesehatan, keamanan lingkungan, KB dan penyuluhan usaha kecil dan mandiri. Kegiatan penyuluhan di sini dapat ditempuh melalui pendekatan kelompok organisasi yang telah dibentuk yakni PKK. Melalui pendekatan ini dapat diarahkan untuk terwujudnya kemampuan kerja sama antara sesama anggota kelompok sehingga mampu menghasilkan inovasi-inovasi baru, mengatasi berbagai resiko usaha, menerapkan skala usaha yang ekonomis untuk memperoleh penghasilan yang lebih baik, serta sadar akan peran serta tanggung jawab sebagai anggota masyarakat yang sedang membangun dengan melalui usaha yakni PKK.

Disamping pendekatan di atas, para kepala desa juga melakukan pendekatan-pendekatan lainnya yakni kepada instansi baik pemerintah maupun swasta yang dipandang dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Instansi-instansi tersebut antara lain Dinas Kesehatan, Keamanan, BKKBN dan Koperasi. Dengan demikian kepala desa disamping selaku nara sumber juga berkedudukan sebagai mediator utama dalam rangka terselenggaranya program-program penyuluhan sebagaimana telah disebutkan.

Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap kegiatan penyuluhan yang telah dilakukan oleh para kepala desa daerah ini. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.2

Tanggapan Responden Terhadap Kegiatan Penyuluhan
Kepala Desa di Kec. Sumarorong

No.	Uraian	Frekuensi	Prosentase (%)
1.	Sangat Baik	20	40
2.	Baik	27	54
3.	Kurang Baik	3	6
4.	Tidak Baik	0	0
Jumlah		50	100

Sumber: Hasil Penelitian di Kecamatan Sumarorong, 2000

Pada tabel 4.2 yang menjelaskan mengenai tanggapan responden terhadap kegiatan penyuluhan kepala desa di

Kecamatan Sumarorong menunjukkan bahwa terdapat 20 orang atau 40% yang menyatakan sangat baik, 27 orang atau 54% menyatakan baik, 3 orang atau 6% menyatakan kurang baik dan tidak ada responden yang menjawab dengan tidak baik.

Pada umumnya responden yang menjawab dengan sangat baik dan baik peranan para kepala desa terhadap kegiatan tersebut, disatu sisi mereka melihat bahwa kepala desa telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Pada sisi lain mereka telah merasakan betapa manfaat dari kegiatan-kegiatan tersebut sehingga perlu tetap dikembangkan dan dipelihara kelangsungannya.

Adapun responden yang menjawab dengan kurang baik, oleh karena mereka tidak memahami arti penting dari kegiatan tersebut, dan salah satu contohnya adalah penyuluhan KB. Tidak sedikit masyarakat yang kurang respek terhadap program tersebut dan telah terlihat dengan 3 responden yang menjawab seperti itu. Mengapa mereka kurang respon? tidak terlepas dari budaya terdahulu yang masih mewarnai pemikiran mereka yang memandang makin banyak anak makin banyak pula rezeki. Disamping itu KB juga dapat menghambat lahirnya keturunan baru.

Tetapi dengan berdasar pada tabel di atas dapatlah difahami bahwa tanggapan masyarakat terhadap penyuluhan yang dilakukan kepala desa sangatlah positif. Itu berarti pula bahwa program kepala desa sebagaimana di atas perlu dipertahankan dan senantiasa dikembangkan lebih lanjut.

2. Pemberian Motivasi

Setiap individu di tengah masyarakat, di kantor, perusahaan, jawatan, tempat kerja, organisasi dan lain-lain mempunyai kebutuhan-kebutuhan biologis dan kebutuhan sosial. Karena kebutuhan itulah sehingga manusia mengadakan aktivitas. Hal ini yang perlu difahami oleh setiap kepala desa dalam mengayomi masyarakat agar segala aktivitas yang dilakukan dapat dikoordinasikan dan dapat disalurkan dalam perbuatan-perbuatan yang bermakna dengan arah dan tujuan pembangunan yang dilaksanakan.

Kebutuhan akan motivasi pada diri seseorang sangatlah penting, oleh sebab itu setiap individu sedapat mungkin memotivasi dirinya sendiri sehingga aktivitas-aktivitas yang dilakukan dapat berhasil guna dan lebih tepat sasaran, meskipun disadari bahwa memotivasi diri sendiri bukanlah suatu hal yang mudah tetapi memerlukan stimulus tersendiri yang mana datangnya sangat bervariasi sesuai dengan apa yang mendasari munculnya dorongan.

Kepala desa selaku aparat pemerintah desa senantiasa menghendaki agar pembangunan yang dilaksanakan dapat berhasil dan dinikmati secara menyeluruh oleh masyarakat. Oleh sebab itu kepala desa dengan segala kemampuan yang dimiliki seyogyanya melakukan berbagai macam cara guna terlaksananya pembangunan secara lebih baik.

Demikian halnya dengan para kepala desa di Kecamatan Sumarorong, dimana dalam melakukan pembangunan senantiasa memberikan dorongan kepada masyarakat. Salah satu wujud dari kepedulian pemerintah desa di daerah ini akan perlunya motivasi bagi masyarakat adalah menyelenggarakan lomba-lomba kebersihan, keterampilan dan sebagainya yang mana pelaksanaannya dikordinir langsung oleh organisasi PKK. Dan untuk lebih jelasnya mengenai kegiatan-kegiatan tersebut, dibawah ini dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.3

Kegiatan Motivasi Kepala Desa
di Kecamatan Sumarorong

No.	Jenis Kegiatan	Frekuensi
1.	Lomba Kebersihan Lingkungan	2 kali
2.	Lomba Keterampilan dan Pengembangan Kreasi	2 kali
3.	Lomba Bayi Sehat	4 kali

Sumber: Hasil Penelitian di Kecamatan Sumarorong, 2000

Dari tabel tersebut terlihat bahwa kepala desa dalam memotivasi masyarakat telah melakukan tiga bentuk kegiatan, yaitu lomba kebersihan lingkungan, lomba keterampilan dan lomba bayi sehat. Lomba kebersihan lingkungan dilakukan tidak lain agar masyarakat akan lebih bergairah dalam upaya untuk tetap memelihara ke-

bersihan lingkungan. Dengan demikian maka secara tidak langsung kegiatan ini merupakan suatu jembatan untuk mensosialisasikan pentingnya pemeliharaan kebersihan sebagai prasyarat dalam membentuk lingkungan masyarakat sehat. Demikian pula kegiatan-kegiatan lainnya seperti menyelenggarakan lomba keterampilan lainnya, bayi sehat dan lain sebagainya. Kesemuanya itu merupakan langkah yang tepat guna lebih membinasakan pola hidup masyarakat yang lebih baik, berorientasi ekonomi dan senantiasa memperhatikan kehidupan yang sejahtera.

Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap kegiatan yang dilakukan para kepala desa tersebut, dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.4

Tanggapan Responden Terhadap Kegiatan Motivasi
Kepala Desa di Kec. Sumarorong

No.	Uraian	Frekuensi	Prosentase (%)
1.	Sangat Baik	40	80
2.	Baik	10	20
3.	Kurang Baik	0	0
4.	Tidak Baik	0	0
Jumlah		50	100

Sumber: Hasil Penelitian di Kecamatan Sumarorong, 2000

Pada tabel 4.4 yang menggambarkan mengenai tanggapan responden terhadap kegiatan motivasi yang dilakukan

para kepala desa di Kecamatan Sumarorong menunjukkan bahwa dari 50 responden yang ada, 40 orang atau 80% diantaranya menjawab dengan jawaban sangat baik, 10 orang atau 20% menjawab baik, sedang tak satu pun responden yang menjawab dengan kurang baik dan tidak baik.

Dengan gambaran demikian, semakin jelaslah betapa program pemerintah dalam hal ini para kepala desa mendapat respon yang sangat baik dari masyarakat. Oleh karena itu diharapkan implementasinya lebih lanjut dan diharapkan pula semakin memberikan manfaat yang lebih besar lagi kepada masyarakat terutama dalam mendorong mereka kepada kehidupan yang lebih baik dan sejahtera.

B. Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Fungsi Kepala Desa Terhadap Pelaksanaan Program PKK

Kepala desa selaku aparat pemerintah desa bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Oleh karena itu, untuk dapat mewujudkan pembangunan dengan baik maka pada diri setiap kepala desa melekat sejumlah tugas dan fungsi yang akan dilaksanakan. Adapun tugas dan fungsi dari kepala desa sangat bervariasi sesuai dengan situasi dan kondisi di mana ia berdomisili. Tetapi pada prinsipnya terdapat tiga fungsi utama yang harus dilaksanakan oleh setiap kepala desa. Ketiga fungsi tersebut meliputi: fungsi koordinasi, organisasi dan fungsi administrasi.

Dalam melakukan fungsi-fungsinya maka ia sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Terhadap hal ini penulis melihat bahwa para kepala desa yang ada di Kecamatan Sumarorong dipengaruhi oleh dua faktor utama yakni faktor internal (dari dalam) dan faktor eksternal (dari luar).

1. Faktor Internal

Faktor internal dalam konsepsi di sini adalah faktor dari dalam diri manusia sendiri. Dengan demikian faktor internal pada diri setiap kepala desa adalah kemampuan dirinya sendiri dalam melaksanakan fungsi-fungsinya. Dalam hal ini keberadaannya sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan, pengetahuan, pengalaman, kepribadian dan sebagainya. Oleh karena itu masalah internal merupakan sesuatu yang bersifat abstrak dan kualitasnya hanya dapat diamati dari implementasinya.

Kepala desa dalam kedudukannya sebagai individu, sebagai anggota masyarakat terlebih selaku aparat pemerintah desa yang merupakan pemerintahan tertinggi di tingkat desa senantiasa tidak terlepas dari tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan dan menyukseskan pembangunan di daerahnya dengan baik. Dengan dasar ini para kepala desa yang ada di Kecamatan Sumarorong pada umumnya berpendapat bahwa keberhasilan dirinya dalam mengayomi dan mengantarkan daerahnya masing-masing kepada pelaksanaan pembangunan termasuk pembangunan di bidang PKK

tidak terlepas dari faktor-faktor internal. Artinya terselenggaranya pembangunan di semua sektor sangat dipengaruhi oleh kemampuannya di dalam melihat, mencerna dan mengambil keputusan sebagai wujud nyata dari usaha kearah perbaikan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Begitu pula sebaliknya mereka terkesan mengalami kesulitan-kesulitan dalam mengembangkan pembangunan di daerahnya masing-masing juga tidak terlepas dari keterbatasan dirinya dalam memformat kebijakan yang akan ditempuh.

Dan untuk mengetahui bagaimana tanggapan, pendapat dan pemikiran para kepala desa di Kecamatan Sumarorong terhadap faktor internal tersebut mempengaruhi dirinya dalam melaksanakan tugas-tugasnya, akan diterangkan lebih lanjut dalam gambaran tabel sebagai berikut:

Tabel 4.5

Tanggapan Para Kepala Desa Terhadap Faktor Internal Mempengaruhi Fungsinya di Kec. Sumarorong

No.	Uraian	Frekuensi	Prosentase (%)
1.	Sangat berpengaruh	4	80
2.	Berpengaruh	1	20
3.	Kurang berpengaruh	0	0
4.	Tidak berpengaruh	0	0
Jumlah		5	100

Sumber: Hasil Penelitian di Kecamatan Sumarorong, 2000

Dari tabel 4.5 yang menjelaskan mengenai tanggapan para kepala desa terhadap faktor internal mempengaruhi fungsinya, diketahui bahwa dari lima desa yang menjadi sampel terdapat 4 kepala desa atau 80% yang menyatakan bahwa faktor internal sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan, 1 orang atau 20% menjawab berpengaruh dan tidak ada diantara mereka yang menjawab kurang dan tidak berpengaruh sama sekali.

Dengan data seperti itu jelaslah bahwa faktor-faktor internal yang mencakup tingkat pendidikan, pengetahuan dan pengalaman sangatlah berpengaruh terhadap dirinya dalam mengembangkan pembangunan di daerahnya.

Menyadari semua itu, para kepala desa yang ada di daerah ini berusaha sedapat mungkin meningkatkan pendidikan dan pengetahuan mereka melalui kegiatan-kegiatan pendidikan dilakukan secara reguler maupun non reguler, baik yang dilakukan sendiri-sendiri ataupun secara berkelompok. Begitu pula untuk menambah pengalaman mereka yang dilakukan antara lain dengan mengadakan study banding terhadap daerah-daerah lainnya yang dianggap maju dan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam rangka pengembangan desanya. Begitu juga yang dilakukan dengan mengadakan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat yang ditempuh dengan peninjauan langsung kelokasi. Ini tidak lain agar kondisi objektif yang ada di dalamnya dapat diketahui sepenuhnya. Sasarannya dengan jelasnya tidak lain agar kebijakan-kebijakan yang diambil dapat

menyentuh langsung terhadap kepentingan rakyat, dan hambatan-hambatan yang mungkin muncul sebagai akibat dari terjadinya distorsi kepentingan sedapat mungkin dikurangi bahkan kalau perlu dihilangkan sama sekali. Disamping itu rakyat akan semakin dekat dengan pemerintahnya.

2. Faktor Eksternal (dari luar)

Kepala desa dalam kedudukannya selaku pemerintah desa, yang bertugas menjalankan roda pembangunan di desa tidak hanya ditentukan oleh kemampuan dan keterampilan dari dalam dirinya sendiri melainkan juga ditentukan oleh faktor-faktor dari luar (eksternal). Faktor-faktor luar yang dimaksud meliputi: jenjang pemerintahan, masyarakat setempat dan sarana dan prasarana. Demikian sejumlah pendapat yang telah dikemukakan oleh para kepala desa di daerah ini. Dan untuk mengetahuinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6

Tanggapan Para Kepala Desa Terhadap Faktor Eksternal Mempengaruhi Fungsinya di Kec. Sumarorong

No.		Frekuensi	Prosentase (%)
1.	Sangat berpengaruh	5	100
2.	Berpengaruh	0	0
3.	Kurang berpengaruh	0	0
4.	Tidak berpengaruh	0	0
Jumlah		5	100

Sumber: Hasil Penelitian di Kecamatan Sumarorong, 2000

Dari tabel tersebut dapat dimengerti bahwa pada dasarnya para kepala desa yang ada di daerah ini menilai faktor eksternal yang meliputi: jenjang pemerintahan, masyarakat setempat, dan sarana dan prasarana sangat berpengaruh terhadap dirinya dalam mengayomi pembangunan di daerahnya masing-masing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di antara lima kepala desa yang dimintai keterangan, semuanya atau 100% menjawab sangat berpengaruh. Dengan begitu teranglah bahwa masalah eksternal tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan dan kegagalan kepala desa di Kecamatan Sumarorong dalam menjalankan pembangunan.

Jenjang pemerintahan seperti hanya kepala desa, camat, bupati, dan seterusnya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepala desa dalam melakukan pembangunan di daerahnya. Hal tersebut terlihat dari adanya azas desentralisasi dan dekonsentrasi, dimana kepala desa merupakan alat pemerintah pusat yang diperbantukan melaksanakan pembangunan di tingkat desa. Sebagai konsekwensi dari sistem pemerintahan yang demikian, sejumlah perangkat baik berupa UU, hukum dan sebagainya telah ditetapkan di pusat. Dengan demikian kepada desa hanyalah melaksanakan tugas-tugas yang telah ditetapkan dari pusat berdasarkan undang-undang yang ada.

Lalu mengapa jenjang pemerintahan dapat memengaruhi kepala desa dalam melakukan pembangunan

termasuk pembangunan di bidang PPK? perlu diketahui bahwa masyarakat itu berada dalam suatu kemajemukan dimana antara satu daerah dengan daerah lainnya memiliki ciri dan karakteristik-karakteristik tersendiri yang terbentuk berdasarkan kondisi sosial dan budaya masing-masing. Demikian juga kondisi geografis yang dimiliki. Dengan berdasar kepada sistem pemerintahan yang ada, pemerintah desa di satu sisi hanyalah menjalankan kebijaksanaan-kebijaksanaan dari pusat dan pada sisi lain, pemerintah desa diberikan kewenangan untuk menyusun program pembangunan sendiri tanpa harus terikat dengan pemerintah pusat. Akibatnya tidak jarang keputusan pemerintah pusat yang telah dilaksanakan mengalami hambatan-hambatan baik hambatan yang timbul dari masyarakat akibat distorsi kepentingan maupun hambatan yang muncul karena kondisi alam.

Adapun faktor kedua yang juga sangat berpengaruh adalah masyarakat setempat. Isitilah mana menunjuk pada sebuah tempat, desa, kota, suku atau bangsa. Apabila anggota-anggota sesuatu kelompok hidup bersama sedemikian rupa dan dapat memenuhi kepentingan utama mereka, disebut masyarakat setempat.

Masyarakat setempat dapat dipandang sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di desa, tidak terlepas dari suatu tinjauan akan kedudukannya, sebagai subjek dan objek pembangunan.

Sebagai subjek pembangunan, bahwa masyarakat merupakan bagian terpenting dari pelaksanaan pembangunan karena mereka itulah yang akan melaksanakan pembangunan yang diprogramkan pemerintah. Bilamana masyarakat memiliki kemampuan tinggi maka pelaksanaan pembangunan tentu akan lebih berjalan dengan baik. Sebaliknya masyarakat yang tingkat kemampuannya rendah, tentu akan mengakibatkan pelaksanaan pembangunan mengalami hambatan.

Masyarakat yang ada di Kecamatan Sumarorong menurut pengamatan para kepala desa yang ada di daerah ini memiliki keragaman tingkat kemampuan dalam merespon kebijakan yang dikeluarkan. Pada dasarnya mereka yang tingkat pendidikannya lebih tinggi lebih responsip di dalam menjemput kebijakan. Tetapi masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah, mengalami kesulitan-kesulitan baik dibidang teknis ataupun dalam menerima kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, bahkan tidak sedikit yang menolaknya. Dengan demikian kemampuan masyarakat yang dapat dilihat dari tingkat pendidikannya merupakan variabel penting yang mempengaruhi jalannya pembangunan.

Disamping kondisi masyarakat demikian, kondisi sosial budaya juga turut menentukan pelaksanaan pembangunan. Lihatlah misalnya dengan adanya keragaman sosial budaya yang dimiliki masyarakat kecamatan Sumarorong, para kepala desa di daerah ini kadang-kadang mengalami kesulitan dalam menerapkan kebijakannya.

Sebagai contoh kebijakan pemerintah dibidang KB yang memanfaatkan organisasi PKK sebagai mediator utama. Dalam implementasinya tidak sedikit masyarakat yang kurang respek bahkan menolak sama sekali, dengan suatu alasan bahwa KB merupakan program pemerintah yang dapat mengurangi rezeki.

Pandangan masyarakat yang menolak kehadiran KB dengan segala macam alasan seperti itu tidak terlepas dari pengaruh budaya yang masih kental dimiliki masyarakat, sehingga untuk merubahnya memerlukan rentang waktu yang lebih lama.

Faktor ketiga yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di desa adalah ketersediaan sarana dan prasarana. Yang dimaksud dengan sarana dan prasarana adalah segala sesuatu yang dapat menunjang terhadap pelaksanaan pembangunan yang meliputi materi, gedung-gedung, peralatan-peralatan lainnya yang lebih bersifat fisik.

Dalam hubungannya dengan pelaksanaan pembangunan khususnya di bidang PKK kepala desa di Kecamatan Sumarorong masih mengalami hambatan-hambatan misalnya keterbatasan dana untuk membiayai program-program yang diselenggarakan PKK kurangnya tenaga-tenaga yang lebih profesional untuk membimbing dan mengarahkan organisasi PKK serta terbatasnya bangunan-bangunan fisik lainnya yang dapat dijadikan wadah untuk terselenggaranya

program. Kesemuanya itu merupakan faktor yang dapat menghambat jalannya pelaksanaan pembangunan. Meskipun demikian pelaksanaan program PKK juga terlaksana dengan keuletan dan ketekunan baik pemerintah setempat maupun masyarakat pada umumnya dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang tersedia.

Terselenggaranya pelaksanaan pembangunan yang demikian itu merupakan bukti nyata betapa pentingnya pembangunan dilakukan. Dengan pembangunan masyarakat akan lebih berkembang. Dengan pembangunan pula pola hidup masyarakat yang tradisional dapat dirubah menjadi pola hidup yang lebih maju dan modern tanpa harus meninggalkan nilai-nilai budaya, etika dan moral yang baik. Tegasnya bahwa hanya dengan pembangunan masyarakat adil dan makmur dapat diwujudkan.

C. Pelaksanaan Program PKK di Kecamatan Sumarorong

Salah satu jalan untuk melihat keberhasilan peranan para kepala desa di Kecamatan Sumarorong dalam melaksanakan pembangunan adalah terlaksananya program PKK pada masing-masing daerah, sebab PKK merupakan suatu organisasi yang didalamnya mencakup program-program penting baik dari pemerintah maupun program PKK sendiri yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Dengan terlaksananya program-program PKK tersebut sekaligus merupakan ukuran keberhasilan kepala desa disetiap

daerah. Sebaliknya tidak terlaksananya program PKK tersebut juga merupakan ketidakberhasilan para kepala desa dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya masing-masing.

Untuk mengetahui bagaimana kegiatan-kegiatan yang dilakukan organisasi PKK Kecamatan Sumarorong, berikut ini akan diuraikan secara lebih rinci dalam gambaran tabel sebagai berikut:

a. Kegiatan Kelompok Kerja I PKK Kecamatan Sumarorong

Tabel 4.7

Kegiatan Kelompok Kerja I
PKK Kecamatan Sumarorong

No.	Bidang P4 dan Gotong Royong	Jenis Kegiatan	Frekuensi
1.	P 4	- Simulasi P4 - Kegiatan keagamaan	1 kali 4x/Bulan
2.	Gotong Royong	- Kerja Bakti	1x/Bulan

Sumber: Hasil Penelitian di Kecamatan Sumarorong, 2000

Tabel 4.7 yang menggambarkan mengenai kegiatan kelompok kerja I PKK Kecamatan Sumarorong menunjukkan bahwa di dalam pokja I yang terdiri atas dua bidang yakni Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (P4) dan gotong royong, telah melakukan beberapa kegiatan antara lain, untuk bidang P4 telah melakukan kegiatan simulasi P4 sendiri dan kegiatan keagamaan lainnya, seperti halnya

pangajian, arisan, membentuk TPA dan TKA. Adapun bidang gotong royong juga telah melakukan kegiatan kerja bakti seperti membersihkan selokan, memperbaiki pekarangan rumah ibadah dan sebagainya.

Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap kegiatan yang telah dilakukan PKK tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8

Tanggapan Responden Terhadap Kegiatan
Pokja I PKK Kec. Sumarorong

No.	U r a i a n	Frekuensi	Prosentase (%)
1.	Sangat baik	28	56
2.	Baik	22	44
3.	Kurang baik	0	0
4.	Tidak baik	0	0
J u m l a h		50	100

Sumber: Hasil Penelitian di Kecamatan Sumarorong, 2000

Dari jawaban responden di atas, dimana terlihat bahwa terdapat 28 responden atau 56% yang menjawab sangat baik, 22 orang atau 44% menjawab baik dan responden yang menjawab kurang dan tidak baik tidak ada, diketahui bahwa kegiatan kelompok kerja I yang membidangi P4 dan gotong royong telah dapat berjalan dengan baik. terlaksananya program PKK demikian tidak terlepas dari dukungan dan partisipasi semua komponen yang ada, mulai dari

masyarakat umum, kadar PKK sampai pada pemerintah setempat.

b. Kegiatan Kelompok Kerja II PKK Kec. Sumarorong

Dalam kelompok kerja II terdapat dua bidang utama yang meliputi bidang pendidikan dan keterampilan serta bidang pengembangan kehidupan berkoperasi. Bidang pendidikan dan keterampilan bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat agar semakin berkembang. Sedang bidang pengembangan koperasi dimaksudkan bagaimana hidup berkoperasi agar dengan koperasi usaha bersama berdasar azas kekeluargaan dan kegotongroyongan dapat tercapai.

b. Kegiatan Kelompok Kerja II PKK Kec. Sumarorong

Tabel 4.9

Kegiatan Kelompok Kerja II
PKK Kec. Sumarorong

No.	Bidang pendidikan dan keterampilan serta peng. kehidupan berkoperasi	Jenis kegiatan	Frekuensi
1.	Pendidikan dan keterampilan.	- Membentuk kelompok belajar Paket A	1x/bulan
		- Membentuk kelompok belajar Paket B	1x/bulan
2.	Pengembangan kehidupan berkoperasi	- Kejar usaha	2 Klp

Sumber: Hasil Penelitian di Kecamatan Sumarorong, 2000

Pada tabel 4.9 di atas yang menjelaskan mengenai kegiatan yang telah dilakukan dalam kelompok kerja II PKK Kecamatan Sumarorong yang membidangi masalah pendidikan dan keterampilan serta pengembangan kehidupan berkoperasi diketahui bahwa bidang pendidikan dan keterampilan telah membentuk 2 buah kelompok belajar yakni kelompok belajar Paket A dan kelompok belajar Paket B. Begitu juga dengan bidang pengembangan kehidupan berkoperasi yang telah membina 2 buah kelompok usaha yang bertujuan untuk lebih meningkatkan penghasilan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan kejar usaha.

Tabel 4.10

Tanggapan Responden Terhadap Kegiatan
Pokja II PKK Kec. Sumarorong

No.	U r a i a n	Frekuensi	Prosentase (%)
1.	Sangat baik	27	54
2.	Baik	20	40
3.	Kurang baik	3	6
4.	Tidak baik	0	0
J u m l a h		50	100

Sumber: Hasil Penelitian di Kecamatan Sumarorong, 2000

Pada tabel di atas diketahui, responden yang menjawab dengan sangat baik sebanyak 27 orang atau 54%, 24 orang atau 40% yang menjawab baik, 3 orang atau 6% yang menyatakan kurang baik dan tidak satu pun responden yang menjawab tidak baik.

Terjadinya keragaman jawaban responden tersebut tentu tidak terlepas dari penilaian masing-masing individu terhadap kegiatan PKK tersebut. Bagi mereka yang menjawab sangat baik dan baik, oleh karena dipandang bahwa kegiatan PKK tersebut banyak membawa manfaat bagi masyarakat. Sedangkan yang menjawab dengan kurang baik bukan programnya tetapi lebih ditujukan kepada para kader PKK sendiri yang dalam implementasi program belum memperlihatkan kinerja yang maksimal.

a. Kegiatan Kelompok Kerja III PKK Kecamatan Sumarorong

Tabel 4.11

Kegiatan Kelompok Kerja III
PKK Kec. Sumarorong

No.	Bidang Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga	Jenis Kegiatan	Frekuensi
1.	Pangan dan sandang	- Membina unit kerajinan masyarakat	1 unit
2.	Perumahan dan tata laksana rumah tangga	- Membina pemanfaatan pekarangan rumah	30 KK

Sumber: Hasil Penelitian di Kecamatan Sumarorong, 2000

Organisasi PKK Kecamatan Sumarorong yang membidangi program sandang, pangan dan perumahan dan tata laksanaan rumah tangga telah melakukan beberapa unit kegiatan. Untuk program pangan dan sandang, PKK telah mengadakan pembinaan terhadap kerajinan yang terdapat dalam

masyarakat. Sedangkan untuk program perumahan dan tata laksana rumah tangga, PKK juga telah membina kurang lebih 30 keluarga untuk memanfaatkan pekarangan rumah masing-masing dengan apotik hidup atau pun penataan halaman yang lebih baik.

Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan tersebut di bawah ini akan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.12

Tanggapan Responden Terhadap Kegiatan
Pokja III PKK Kec. Sumarorong

No.	U r a i a n	Frekuensi	Prosentase (%)
1.	Sangat baik	25	50
2.	Baik	25	50
3.	Kurang baik	0	0
4.	Tidak baik	0	0
J u m l a h		50	100

Sumber: Hasil Penelitian di Kecamatan Sumarorong, 2000

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada umumnya masyarakat menilai positif kegiatan yang telah dilakukan oleh organisasi PKK khususnya yang membidangi program sandang, pangan perumahan dan tata laksana rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di antara 50 responden, 25 orang atau 50% memberi jawaban dengan

sangat baik, 25 orang atau 50% juga yang memberi jawaban dengan sangat baik, 25 orang atau 50% juga yang memberi jawaban dengan baik dan tak satu pun responden yang menjawab dengan kurang baik dan tidak baik.

Dengan argumen seperti itu dapat disimpulkan betapa kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dan betapa para kader-kader PKK telah dapat melaksanakan programnya dengan baik pula sehingga masyarakat telah menikmati manfaatnya dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan tersebut.

d. Kegiatan Kelompok Kerja IV PKK Kec. Sumarorong

Tabel 4.13

Kegiatan Kelompok Kerja IV
PKK Kec. Sumarorong

No.	Bidang kesehatan, kelestarian lingkungan hidup dan perencanaan sehat	Jenis kegiatan	Frekuensi
1.	Kesehatan dan perencanaan sehat	- Membentuk kader kesehatan dan KB	6 orang
2.	Kelestarian lingkungan hidup	- Mengadakan Pos-yandu	2x/Bln

Sumber: Hasil Penelitian di Kecamatan Sumarorong, 2000

Mengenai kegiatan yang telah dilakukan oleh organisasi PKK yang membidangi program kesehatan dan perencanaan sehat telah melakukan beberapa kegiatan, antara lain telah membentuk kader-kader KB dan Kesehatan.

Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan penyuluhan dan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat agar mereka dapat hidup lebih baik.

Adapun program kelestarian lingkungan hidup yang masuk dalam kelompok kerja IV belum menampakkan kegiatan yang aktual. Hal tersebut diakibatkan keterbatasan organisasi PKK untuk membuat kegiatan yang dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya.

Tabel 4.14

Tanggapan Responden Terhadap Kegiatan Pokja IV PKK Kec. Sumarorong

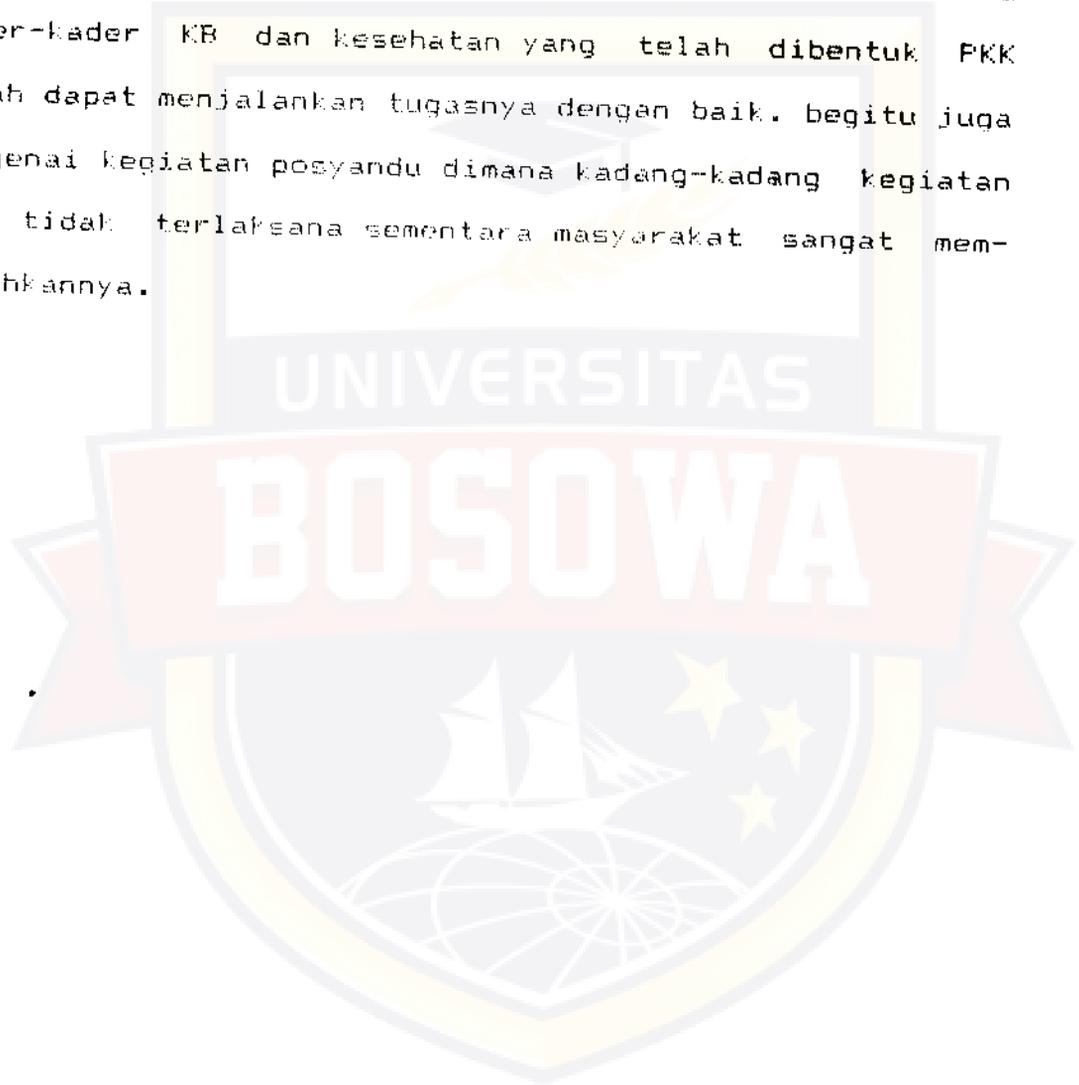
No.	U r a i a n	Frekuensi	Prosentase (%)
1.	Sangat baik	20	40
2.	Baik	25	50
3.	Kurang baik	5	10
4.	Tidak baik	0	0
J u m l a h		50	100

Sumber: Hasil Penelitian di Kecamatan Sumarorong, 2000

Dari tabel di atas diketahui bahwa terdapat 20 responden atau 40% yang menyatakan sangat baik, 25 responden atau 50% menyatakan baik, 5 responden atau 10% menyatakan kurang baik dan tak satu pun yang menjawab tidak baik. Dengan demikian disimpulkan bahwa kegiatan yang telah dilakukan oleh organisasi PKK khususnya yang membidangi program kesehatan dan perencanaan sehat telah dapat berjalan dengan baik meski

diketahui terdapat sejumlah responden yang menjawab dengan kurang baik.

Mengenai adanya jawaban dari responden yang demikian, di satu sisi disebabkan oleh karena tidak semua kader-kader KB dan kesehatan yang telah dibentuk PKK telah dapat menjalankan tugasnya dengan baik. begitu juga mengenai kegiatan posyandu dimana kadang-kadang kegiatan ini tidak terlaksana sementara masyarakat sangat membutuhkannya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil pembahasan dalam penelitian ini meliputi:

1. Beberapa bentuk peranan kepala desa terhadap pelaksanaan program PKK di Kecamatan Sumarorong. Adapun bentuk-bentuk peranan kepala desa itu meliputi: pemberian penyuluhan dan pemberian motivasi. Pemberian penyuluhan dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan baik yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung yang ditempuh dengan mengadakan kerja sama dengan instansi lain yang dianggap penting. Adapun pemberian motivasi dilakukan dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan perlombaan guna lebih mendorong masyarakat kepada hal-hal yang lebih baik.
2. Kepala desa dalam melaksanakan fungsi-fungsinya dipengaruhi oleh dua faktor utama, kedua faktor tersebut meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang bersumber dari dalam diri pribadi kepala desa sendiri. Dalam hal ini sangat terkait dengan kemampuan pribadinya. Adapun faktor eksternal adalah yang bersumber dari luar diri setiap kepala desa yang mencakup hirarki pemerintahan, masyarakat setempat dan sarana dan prasarana, penunjang lainnya.

3. Pelaksanaan program PKK di Kecamatan Sumarorong telah berjalan dengan baik. Hal tersebut tercermin dari implementasi program PKK dari program kerja yang telah ditetapkan. Begitu juga tanggapan masyarakat yang sangat baik terhadap pelaksanaan program PKK.
4. Pada dasarnya terlaksananya program PKK dengan baik dan sukses tidak terlepas dari partisipasi anggota PKK khususnya dan masyarakat pada umumnya. Disamping itu peran aktif dari pemerintah setempat, dalam hal ini kepala desa dalam mengupayakan pelaksanaan program PKK juga sangat menentukan.

B. Saran-Saran

Mengenai saran-saran yang akan penulis kemukakan disini antara lain:

1. Bahwa untuk terlaksananya program PKK secara maksimal, diperlukan adanya peranan yang lebih besar yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu kepala desa dalam hal ini selaku pemerintah desa dituntut perannya yang lebih besar lagi.
2. Bahwa agar kepala desa dalam melakukan fungsinya dapat berjalan dengan baik dan sukses, dituntut adanya kemampuan individu yang dimiliki. Oleh karena itu kepala desa senantiasa diisyaratkan untuk lebih menambah pengetahuannya.

3. Bahwa terlaksananya program FFK dengan baik tidaklah mungkin dapat terwujud tanpa adanya dukungan dari semua komponen yang ada dalam masyarakat. Untuk itu kerja sama dan saling menghormati diantara komponen-komponen itu mutlak adanya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Teori

- Djadadiwangsa, Sudarmo, 1979. Pokok-Pokok Pengertian PKK, Ditjen Bangdes Propinsi Sulawesi Selatan, Ujung Pandang.
- Hatmanto, 1977. Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Surabaya: Bina Ilmu.
- Mustafa, dkk., 1987. Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Bandung: Armico.
- Ndraha, Talizidhu, 1984. Dimensi-Dimensi Pembaharu Desa, Jakarta: Bina Aksara.
- Tjokroamidjojo, Bintoro, 1986. Pengantar Administrasi Pembangunan, Jakarta: LPSES.
- Team Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1988. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Depdikbud R.I.
- Soekanto, Soejono, 1990. Sosiologi Keluarga, Tentang Ikhwil Keluarga, Remaja dan Anak, Jakarta: Rineka Cipta.
- Suryaningrat, Bayu, 1981. Pemerintahan dan Administrasi Desa, Jakarta: Aksara Baru.
- Sumarno, dkk, 1984. Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Jakarta, PT. Sampurna Kurnia.
- Soekarno K, 1980. Dasar-Dasar Manajemen, Jakarta: Miewar.
- Suparni, 1986. Ilmu Sosial Dasar. Surabaya-Indonesia: Penerbit Usaha Nasional.
- Sutarsa, 1984. Dasar-Dasar Organisasi, Yogyakarta: Gadjah Mada, University Press.
- Siagian, S.P., 1989. Dimensi-Dimensi Ilmu Administrasi Negara, Jakarta: Bina Aksara.

B. Buku Penelitian

- Aminin, Tatang M, 1966. Menyusun Rencana Penelitian, Jakarta: CV. Rajawali.

Singarimbun, Masri dan Sofiah Efendi, 1987. Metode Penelitian Survey, Jakarta: LP3ES.

Nazir, M. 1985. Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia.

C. Lain-Lain

Anonim, 1989. Pedoman Pembuatan Skripsi, Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Anonim, 1990. Pedoman Pembuatan Skripsi, Makassar, Universitas "45" Makassar.

